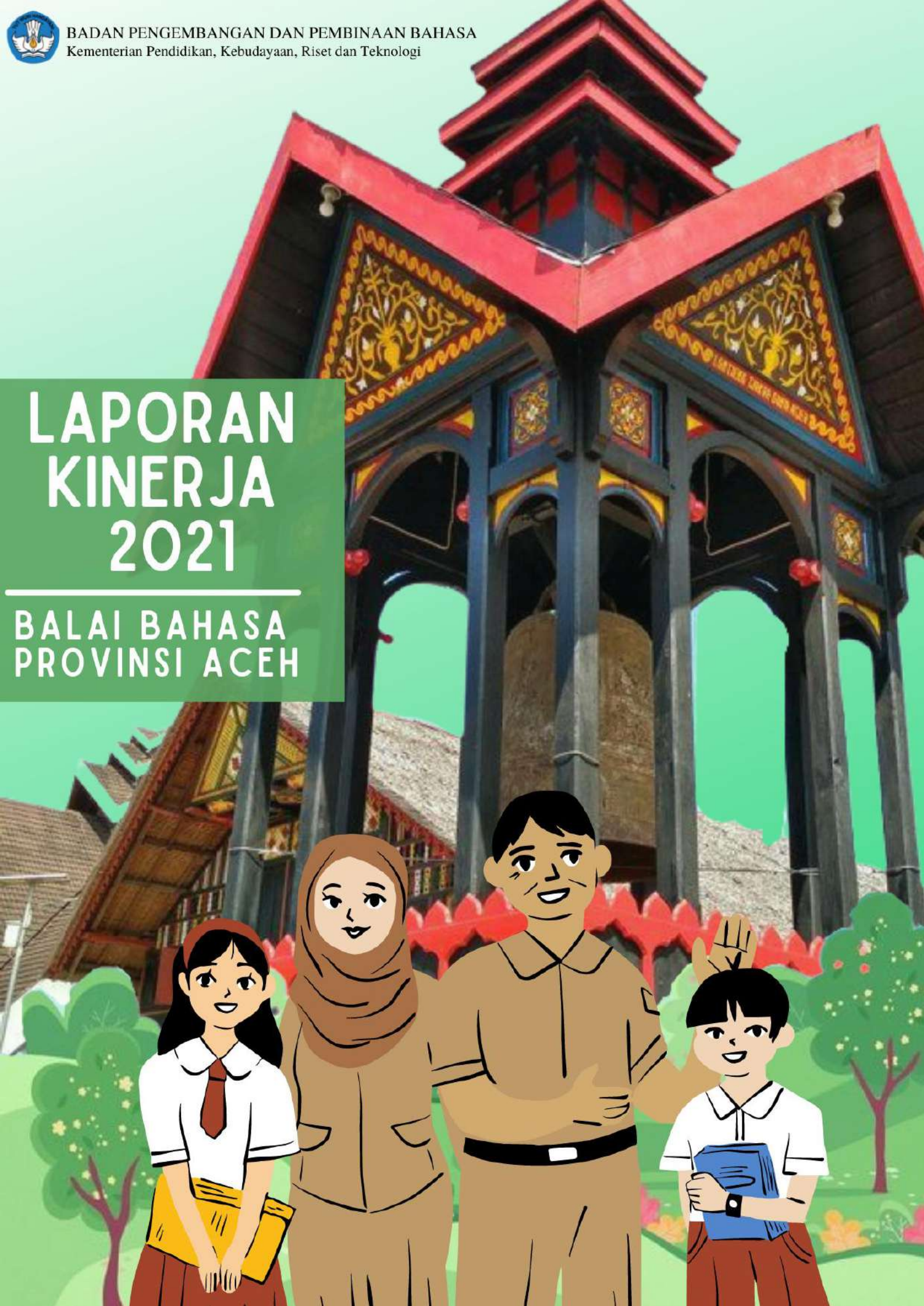




BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

LAPORAN KINERJA 2021

BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita selalu dalam kasih sayang dan lindungan-Nya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Bahasa Aceh tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di Provinsi Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan Kinerja setiap tahun.

LAKIP Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari awal periode Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategi dan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Aceh tahun 2021.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Balai Bahasa Aceh dalam tahun 2021 yang meliputi kinerja atas pencapaian 5 sasaran kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2021. Target dan capaian kegiatan ini akan terus dilaksanakan setiap tahun secara bertahap dan terus ditingkatkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh 2020--2024. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.



Kata Pengantar

Tantangan dan permasalahan saat ini yang masih harus diselesaikan di antaranya, Penggunaan Bahasa Media Luar Ruang, Peningkatan Literasi dikalangan pendidik sehingga mampu meningkatkan literasi dikalangan pelajar, pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta peningkatan minat baca di kalangan guru dan siswa, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermabfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara umum Balai Bahasa Provinsi Aceh telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing IKK dan sasaran kegiatan dengan cukup baik.

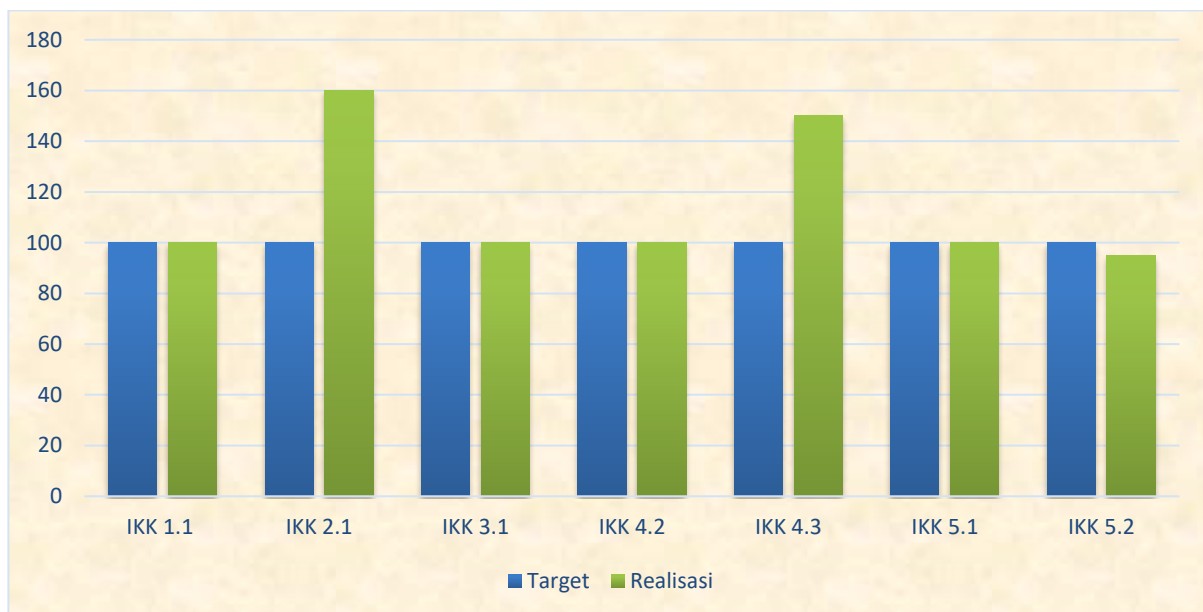


Banda Aceh, 28 Januari 2022
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh,

Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP.196606142003121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai pada seluruh kegiatan dengan menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai umpan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja tahun-tahun mendatang. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja (Periode Januari s.d. Desember 2021) ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pemangku kebijakan dan pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2021 seperti tampak pada grafik berikut.





Capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

SK.1 MENINGKATNYA DAYA UNGKAP BAHASA INDONESIA

CAPAIAN IKK 1.1



REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian kosakata Bahasa Indonesia jumlah anggaran berupa Rp 290.050.000 dengan total serapan yaitu 98,34%.

KENDALA - STRATEGI

Kendala/Hambatan

Kendala yang dialami ketika kegiatan berlangsung yaitu narasumber di daerah yang kurang menguasai materi yang menjadi pertanyaan panitia. Selanjutnya, jumlah hari yang terbatas juga menjadi kendala.

Strategi

Untuk mendukung keabsahan kosakata yang ditemukan maka pada kegiatan lokakarya dihadirkan narasumber dari berbagai bidang terkait dengan kemaritiman seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh



SK.2 TERWUJUDNYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

CAPAIAN IKK 2.1



REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia jumlah anggaran berupa Rp 308.769.000 dengan total serapan yaitu 99,99%.

KENDALA - STRATEGI

Kendala/Hambatan

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi sehingga target indikator kinerja ini tidak semudah yang dibayangkan karena untuk melakukan kegiatan pengawasan, kegiatan aksi perubahan bahasa di daerah tidak gampang, karena pihak yang kita lakukan kegiatan belum tentu bisa dengan mudah menerima apa yang kita harapkan, karena persoalan bahasa bukan merupakan hal yang dianggap penting, apalagi pihak swasta yang tidak terlalu peduli dengan apa yang kita suluh. Selain itu, kendala berupa dalam pelaksanaan kegiatan seperti keterlambatan peserta.

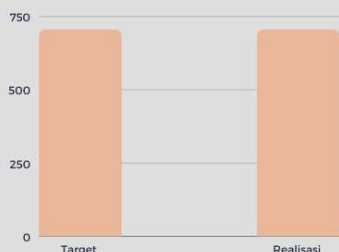
Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencegah hambatan kecil seperti keterlambatan peserta dan sebagainya adalah tetap melakukan koordinasi kepada peserta dan seluruh panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Namun, untuk meningkatkan kepedulian lembaga terhadap pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik yang baik dan benar, kita melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem disiplin Bahasa Indonesia.



SK.3 MENINGKATNYA JUMLAH PENUTUR BAHASA TERBINA

CAPAIAN IKK 3.1



REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra jumlah anggaran berupa Rp 522.500.000 dengan total serapan yaitu 99,63%.

KENDALA - STRATEGI

Kendala/Hambatan

Pandemi covid-19 juga menjadi sebab bergesernya jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan berubah lagi sampai dengan belum jelasnya kapan akan melaksanakan kegiatan, karena orang di kabupaten membatasi kunjungan ke daerah mereka. Untuk menuju daerah tujuan perlu persiapan yang dianggap mencukupi terkait perjalanan membutuhkan stamina dan kesehatan yang baik

Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencegah hambatan seperti pembatasan aktivitas masyarakat akibat kebijakan PPKM adalah tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk melakukan optimalisasi sisa anggaran sehingga dapat mencapai capaian output menerapkan sistem disiplin Bahasa Indonesia.



SK.4 TERLINDUNGINYA BAHASA DAN SASTRA DAERAH YANG KRITIS DAN TERANCAM PUNAH

CAPAIAN IKK 4.2



REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah jumlah anggaran berupa Rp 110.297.000 dengan total serapan yaitu 100%.

KENDALA - STRATEGI

Kendala/Hambatan

Penentuan narasumber sering kali kurang memenuhi syarat yang kita inginkan karena penghubung di lapangan kurang mendapatkan informasi yang cukup, sastra di daerah sangat kurang mendapat perhatian sehingga menjadikan sastra untuk bisa lebih bisa mendapat perhatian dari masyarakat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dalam proses kegiatan ini, kendala pelaksanaannya adalah karena terjadinya pandemi, PPKM, dan revisi anggaran sehingga kendala tersebut mengharuskan kegiatan untuk diatur jadwal ulang.

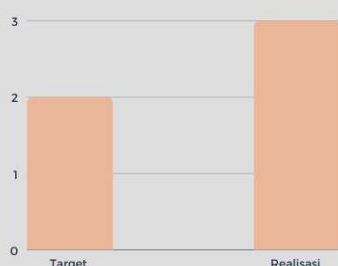
Strategi

Berkoordinasi antara tim dan pimpinan untuk melengkapi berkas serta izin melaksanakan kegiatan. Selain itu, menyesuaikan anggaran dengan hasil revisi.



SK.4 TERLINDUNGINYA BAHASA DAN SASTRA DAERAH YANG KRITIS DAN TERANCAM PUNAH

CAPAIAN IKK 4.3



REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah jumlah anggaran berupa Rp 105.450.000 dengan total serapan yaitu 94,18%.

KENDALA - STRATEGI

Kendala/Hambatan

Hambatan yang dialami dalam penyusunan produk terjemahan ini adalah keterlambatan dalam proses terjemahan sehingga memakan waktu yang lama untuk proses pencetakan. Proses pencetakan terealisasi di bulan November.

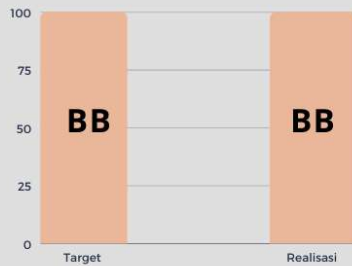
Strategi

Strategi yang dilakukan adalah pimpinan melakukan koordinasi dengan tim terjemahan sehingga dapat terbentuknya proses *follow-up* yang sigap untuk menunda keterlambatan proses pencetakan.



SK.5 MENINGKATNYA TATA KELOLA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

CAPAIAN IKK 5.1



CAPAIAN IKK 5.2



KENDALA - STRATEGI

Kendala/Hambatan 5.1

Dalam melakukan persiapan penilaian SAKIP, tidak semua pegawai memahami kriteria penilaian SAKIP yang baik, sehingga dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen terdapat beberapa dokumen yang belum lengkap serta penyusunan laporan yang masih harus diperbaiki

Strategi 5.1

Strategi yang dilakukan adalah berkonsultasi dan koordinasi rutin dengan unit Eselon I serta dengan cermat melakukan pendataan dokumen kebutuhan penilai SAKIP.

Kendala/Hambatan 5.2

Pada aplikasi pengukur nilai IKPA, masih terdapat ketidaksinkron antara capaian output yang dikonfirmasi dengan data yang diperhitungkan. Selanjutnya, rendahnya nilai EKA yang dikarenakan oleh capaian output yang dikonfirmasi dengan target tidak selaras oleh karena itu dapat menurunkan nilai EKA yang dimana 60% dari nilai EKA masuk dalam perhitungan NKA.

Strategi 5.2

Strategi yang dilakukan adalah memastikan kedua aplikasi yang dilakukan untuk mengkonfirmasi capaian output sudah selaras dan benar.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
D. Isu-Isu Strategis/ Permasalahan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Kinerja Menengah (Resntra)	9
B. Visi dan Misi	9
C. Tujuan dan Sasaran	10
D. Perjanjian Kinerja 2021.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	49
1. Perjanjian Kinerja (PK Awal dan PK Revisi)	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
3. Rencana Aksi	
4. Pengukuran Kinerja TA 2021	
5. SK Tim Penyusunan LAKIN 2021	
6. Cascading Renstra	
7. Notula Reviu LAKIN 2021	
8. Lembar Reviu LAKIN Satker Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN





A. Gambaran Umum

Balai Bahasa Provinsi Aceh berdiri sejak tahun 1999 dengan Surat Keputusan Nomor 226/O/1999 tanggal 23 September 1999. Jumlah SDM yang bekerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebanyak 39 orang ditambah 7 orang PPNPN yang terdiri dari 1 orang pengemudi, 2 orang pramubakti dan 4 orang satuan pengamanan. Balai Bahasa Provinsi Aceh dikepalai oleh Karyono, S.Pd., M.Hum. yang mulai bertugas sejak September tahun 2020.

Selama berdirinya Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah mengalami 5 kali penggantian pimpinan, gedung Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan milik sendiri yang beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Kota Banda Aceh.



Balai Bahasa Provinsi Aceh di Bawah Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan institusi negara yang bertugas melaksanakan pembangunan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Aceh. Dalam kaitan itu, Balai Bahasa memiliki tugas dan fungsi:

- (a) pengkajian bahasa dan sastra;
- (b) pemetaan bahasa dan sastra;
- (c) pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- (d) fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- (e) pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- (f) pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa.



B. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan, Balai Bahasa Provinsi Aceh mengacu pada

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),
2. Undang –Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015 ---2025,
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia,
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2006,
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa,
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2020,
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Pendahuluan

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 21 Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Aceh menyusun rencana dan kegiatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020-2024.

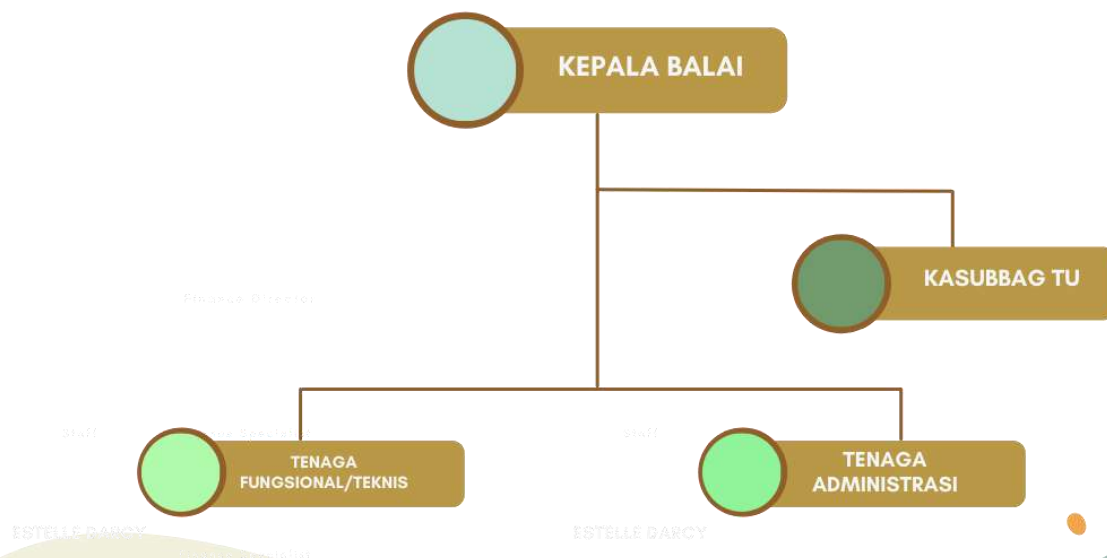
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 21 Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, unit organisasi Balai Bahasa Provinsi Aceh adalah:

Struktur organisasi pada Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Kepala Balai
2. Kasubbag Tata Usaha
3. Tenaga Administrasi berjumlah 15 Orang
4. Tenaga Fungsional 4 Orang
5. Tenaga Teknis 18 Orang

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH





Pendahuluan

Subbagian:

1. Subbagian Teknis
 1. Pembinaan
 2. Pengembangan
 3. Perlindungan
2. Subbagian Tata Usaha
 1. Kepegawaian
 2. Keuangan
 3. Perlengkapan
 4. Perencanaan

Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/2002, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja, demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Balai Bahasa Provinsi Aceh ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat capaian sasaran yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2021 sebagai wujud dari pengembangan misi dalam rangka mewujudkan visi Balai Bahasa Provinsi Aceh. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan masukan kepada pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek dalam rangka pengambilan kebijakan ataupun keputusan-keputusan untuk perencanaan tahun-tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Balai Bahasa Provinsi Aceh ini memuat capaian kinerja selama 1 tahun (Januari s.d. Desember 2021). Capaian kinerja itu diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan struktur program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh.



D. Isu Isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan tugas pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di daerah, Balai Bahasa Provinsi Aceh telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dan akan dihadapi. Permasalahan tersebut adalah:

1. Ketidakseimbangan kualifikasi birokrasi, yaitu kesenjangan jenjang birokrasi di daerah sering menjadi kendala yang menyebabkan kerja sama itu tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kerja sama dan koordinasi lembaga kebahasaan. Badan Bahasa dengan balai lebih tepat untuk menjadi koordinator kegiatan kebahasaan di wilayah kerja masing-masing. Dikatakan tepat karena lembaga ini membentuk jaringan yang diperlukan bagi penanganan bahasa, yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan lokal saja. Koordinasi itu dimulai dengan pemetaan masalah.
2. Menurunnya sikap positif masyarakat. Yang dimaksud adalah akhir-akhir ini dirasakan ada gejala bahwa sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah mulai memudar. Hal itu tercermin dalam penggunaan bahasa masyarakat di tempat-tempat umum, seperti pada papan nama dan pada media luar ruang. Pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya menjadi kendala bagi penanganan masalah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia dan daerah.
3. Ketidakseimbangan sumber daya manusia kebahasaan, yaitu terjadi ketidakseimbangan antara banyaknya masalah kebahasaan yang harus ditangani dan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana.
4. Balai Bahasa, dengan dibantu organisasi-organisasi yang terkait mengidentifikasi, menginventarisasi, dan akhirnya memetakan masalah kebahasaan di wilayah kerja masing-masing. Sesudah diperoleh peta masalah, dirumuskan program untuk mengatasi masalah itu, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
5. Memasuki tahun kedua Indonesia masih menghadapi masalah yang juga dihadapi oleh dunia yaitu masalah virus yang sedang melanda yaitu pandemi covid 19 yang sedang berlangsung dan hal tersebut memaksa dunia Pendidikan merubah cara belajar mengajar dengan tidak bersemuka yang mengakibatkan berkurangnya semangat anak didik dalam kegiatan belajar, orang tua siswa juga mengalami kesulitan dalam mendampingi anaknya dalam proses belajar secara daring, hal ini menyebabkan anak didik kurang menyerap ilmu atau materi yang telah diajarkan dan target pembelajaran yang telah ditetapkan hanya sekedar



Pendahuluan

target akan tetapi sebenarnya anak didik tidak maksimal dalam menguasai pelajaran. berkurangnya serapan materi pembelajaran yang diajarkan berpengaruh kepada tingkat pengetahuan yang seharusnya didapatkan anak didik. Perbedaan tingkatan sosial juga sangat berpengaruh terhadap penerapan belajar dengan sistim daring, masih banyak anak didik yang belum bisa mendapatkan fasilitas gawai yang memadai untuk bias mengakses proses belajar mengajar, akses internet juga belum bisa didapat di daerah tertentu.

6. Isu yang masih terus dihadapi lainnya adalah adanya peraturan yang terus berubah menyesuaikan kondisi yang ada pada saat ini oleh karena itu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan massa harus sangat mematuhi protocol kesehatan, izin dari satgas covid dan pemerintah setempat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





A. Rencana Strategis

Balai Bahasa Provinsi Aceh selaku unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud mempunyai tanggung jawab dan tugas utama sebagai lembaga yang andal dalam melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Provinsi Aceh.

Balai Bahasa Provinsi Aceh menjabarkan Renstra yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan fokus pada penguatan pelayanan, hal ini sesuai dengan RPJMN Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2020—2024 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya perekonomian.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada 2020—2024 dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pengelola program/kegiatan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh.

B. Visi dan Misi

Balai Bahasa Provinsi Aceh memiliki **visi** yang akan dicapai pada tahun 2021, yaitu ***“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong, dan Berkebinekaan Global”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan **misi** sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan Ekosistem Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Mendukung Budaya Riset dan Inovasi Kebahasaan yang Kreatif;
- 2) Mewujudkan Praktik-Praktik Pendidikan Literasi di Masyarakat untuk Meningkatkan Budaya Literasi yang Tinggi yang Ditopang oleh Teknologi Digital;
- 3) Mewujudkan Penguatan Diplomasi Kebahasaan yang Maju;
- 4) Mewujudkan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang Dinamis Berbasis Kekuatan Masyarakat;
- 5) Mewujudkan Layanan Profesional Kebahasaan.



Visi dan misi Balai Bahasa Provinsi Aceh tersebut akan dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai serta mendukung usaha pelaksanaan misi dalam rangka pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Balai Bahasa dalam melaksanakan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima kepada masyarakat. Tata nilai yang dimaksud adalah *amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan*.

Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Undang-Undang No 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, tahun 2015 Serta Lagu Kebangsaan. Hal itu dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai unit pelaksana tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia di Aceh di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tugas tersebut diaplikasikan dalam sejumlah kegiatan, yakni:

1. Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina
2. Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia
3. Sastra Terlindungi
4. Daya Ungkap Bahasa Indonesia
5. Literasi Generasi Muda
6. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
7. Layanan Dukungan Manajemen Satker
8. Layanan Perkantoran

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan strategis lembaga, yaitu

1. Peningkatan kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra;
2. Peningkatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2024
Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Terbina	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	50%
	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	60%
Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	0,59 (Indeks)

Kebijakan dan Program

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh diperlukan sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021. Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh dicapai dalam rangka mendukung sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebagai berikut.

- 1) Opini atas laporan kinerja keuangan
Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis fungsi Sekretariat Badan Bahasa Badan Bahasa yaitu Terwujudnya opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 dan Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 80.
- 2) Meningkatnya jumlah kerja sama kemitraan bidang kebahasaan dan kesastraan
Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis fungsi kerja sama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- 3) Meningkatnya jumlah dokumen pengembangan dan perlindungan bahasa.
Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan dan Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala.
- 4) Sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan apresiasi masyarakat terhadap sastra
Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional.



Dalam pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Restra Balai Bahasa Provinsi Aceh 2020--2024, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan 1 (satu) program, yaitu **Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra**. Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra didukung oleh **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra**.

D. Perjanjian Kinerja 2021

Sesuai dengan Renstra Balai bahasa Provinsi Aceh 2020--2024, Balai Bahasa Provinsi Aceh akan berusaha untuk mencapai 5 Sasaran Kegiatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Adapun Rencana Kerja Tahunan Balai Bahasa Provinsi Aceh seperti tabel di bawah ini.

TARGET CAPAIAN Balai Bahasa Provinsi Aceh

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia	1	Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	1000 Kosakata
2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	68 lembaga
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	704 orang
4	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	2	Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	100 Orang
		3	Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	2 Sastra
5	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat BB
		2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91	Nilai 92



Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh disusun dalam bentuk Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Balai bahasa Provinsi Aceh yang akan dicapai sesuai dengan rencana strategis.

Anggaran di Balai Bahasa Provinsi Aceh, sebesar **Rp 6.239.206.000 (Enam milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah)**. Adapun terjadinya perubahan PK 2021 dikarenakan adanya perubahan Pagu atau adanya revisi/pemotongan anggaran dan menyesuaikan renstra yang berubah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun. Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Aceh berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

A. Capaian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yang mendukung 5 (lima) sasaran kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh selama tahun 2021.

Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya, hal itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang amanatkan. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis unit kerja sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Sasaran Kegiatan #1 : Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

Sasaran kegiatan ini capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu “Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia”.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 “Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia”.

Dalam mencapai indikator jumlah kosakata Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Aceh melakukan kegiatan pencarian data Kosakata bahasa Aceh bidang kemaritiman dengan output akhir adalah kamus terjemahan Bahasa Aceh – Indonesia bidang kemaritiman.



Tabel 3.1 Target dan Realisasi IKK.1.1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	0	1000	1000	1000	1000	1000

Pada tahun 2020, Standar Kegiatan Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia tidak masuk dalam perjanjian kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh. Oleh karena itu, berikut tren capaian Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya:



Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa sasaran kegiatan Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia, realisasi target tahun 2021 sebesar 1000 kosakata dari target indikator kinerja kegiatan sebanyak 1000 kosakata sehingga persentase pencapaian target yaitu 100 %. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh komponen kegiatan Pemerayaan Kosakata.



Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak (satu) indikator kinerja kegiatan dengan *output* 1 (satu) kegiatan terealisasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Ketercapaian tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh berbagai pihak terutama narasumber di daerah tujuan yang sangat mendukung dalam proses pencarian kosakata di bidang kemaritiman.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh kegiatan sebagai berikut:

a. Pemerdayaan Kosakata

Sebagai daerah yang terletak di sisi barat Indonesia, Aceh merupakan salah satu provinsi yang dikelilingi oleh perairan laut internasional dan kawasan lautnya amat luas. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh merencanakan kegiatan penyusunan Kamus Bahasa Aceh Bidang Kemaritiman.

Tahap pertama yang dilakukan untuk memenuhi target 1000 kosakata ini adalah inventarisasi. Inventarisasi Kosakata Bahasa Aceh Bidang Kemaritiman dilakukan di tiga wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu:

1. Kabupaten Aceh Timur (8–12 Maret 2021)
2. Kota Lhokseumawe (8–12 Maret 2021)
3. Kabupaten Aceh Barat (15–19 Maret 2021)

Setiap kelompok melakukan pengambilan data lapangan di satu wilayah (lokus). Setiap kelompok terdiri dari tiga orang. Pengambilan data mengacu pada instrumen yang telah dibuat Tim Analisis Kata dan Istilah mengenai kosakata maritim bahasa Aceh. Instrumen tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok hewan (fauna) laut, tumbuhan (flora) atau tanaman di sekitar laut, peralatan yang digunakan dalam aktivitas melaut, jenis dan bagian kapal, fenomena dan keadaan saat melaut, profesi yang berkenaan dengan aktivitas laut, tradisi melaut, dan kuliner laut. Informan dalam setiap wilayah terdiri dari lima orang yang berprofesi dalam bidang kelautan, seperti pawang laut, nelayan, pembuat kapal, penjual ikan, dan sebagainya.

Pencapaian target indikator kinerja ini tidak semudah yang dibayangkan karena untuk melakukan penelitian di daerah yang ingin dituju, apalagi di masa pandemi yang setiap kali ingin melakukan perjalanan keluar daerah ada pemeriksaan diperbatasan, dalam melakukan aktifitas juga harus mematuhi protokol kesehatan.

Untuk menuju daerah tujuan perlu persiapan fisik dan mental terkait perjalanan yang sangat jauh dan narasumber yang kita dapat dengan berbagai koneksi yang kita punya



belum tentu memenuhi standar yang kita inginkan, padahal kita sudah menjelaskan kriteria calon narasumber di daerah baik dari segi usia, pendidikan, hubungan dengan dunia luar (perantau), juga isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat tentang daerah yang ingin dijadikan sebagai wilayah pengambilan data.

Tabel 3.2 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 1.1

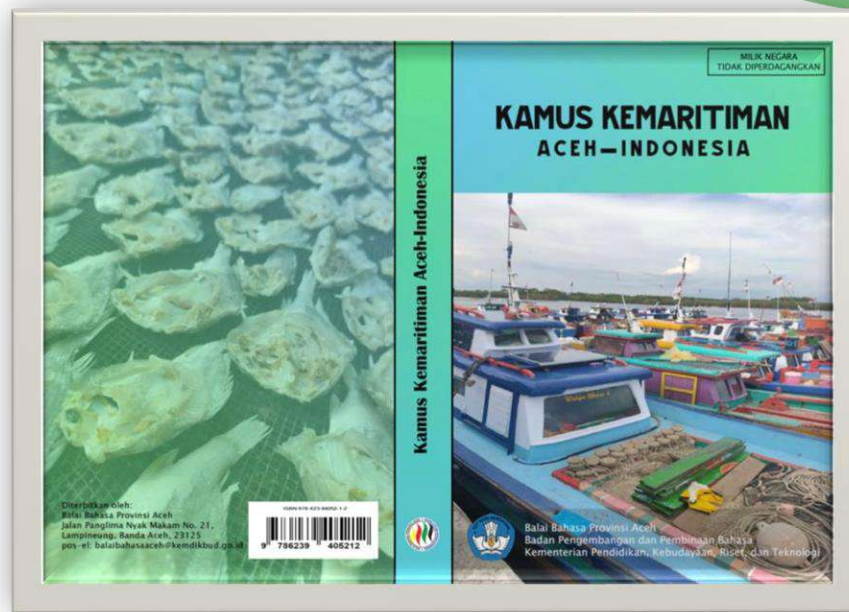
Kendala/Hambatan	Strategi
Kendala yang dialami ketika kegiatan berlangsung yaitu narasumber di daerah yang kurang menguasai materi yang menjadi pertanyaan panitia. Selanjutnya, jumlah hari yang terbatas juga menjadi kendala.	Untuk mendukung keabsahan kosakata yang ditemukan maka pada kegiatan lokakarya dihadirkan narasumber dari berbagai bidang terkait dengan kemaritiman seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh

Selain itu, Balai Bahasa Aceh sudah menyiapkan **beberapa antisipasi** dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu:

- Pemilihan panitia yang ditunjuk untuk melakukan tugas pencarian data
- Mencari narasumber yang berkompeten dibidangnya.
- Pelaksanaan kegiatan diusahakan sesuai perencanaan dan jadwal.
- Dan melakukan studi pustaka.

Dokumentasi kegiatan:





Sasaran Kegiatan #2: Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Sasaran strategis ini capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu “Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina”.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 “Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina ”

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKK 2.1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna Bahasa Indonesia terbina	50	68	109	45	45	45

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah lembaga pengguna Bahasa Indonesia terbina yang ditunjukkan oleh tren dibawah ini.



Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa sasaran kegiatan Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina, realisasi target tahun 2021 sebesar 109 Lembaga dari target indikator kinerja kegiatan sebanyak 68 Lembaga sehingga persentase pencapaian target yaitu 160%. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh komponen kegiatan Lembaga Pemerintah Pengguna Bahasa Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan: Indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak (delapan) Lembaga indikator kinerja kegiatan dengan *output* 109 (seratus sembilan) Lembaga terealisasi dengan persentase capaian sebesar 160%. Ketercapaian tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh berbagai pihak terutama pihak di kabupaten di daerah tujuan yang sangat mendukung terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di daerah mereka menjadi lebih baik.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa pada lembaga pemerintah
- Aksi perubahan pengutamaan bahasa negara
- Penghargaan wajah bahasa lembaga pengguna bahasa
- Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa pada lembaga swasta
- Aksi perubahan pengutamaan bahasa negara
- Kegiatan Menjalin Indonesia 2021.



Tabel 3.4 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 2.1

<i>Kendala/Hambatan</i>	<i>Strategi</i>
Hambatan dan permasalahan yang dihadapi sehingga target indikator kinerja ini tidak semudah yang dibayangkan karena untuk melakukan kegiatan pengawasan, kegiatan aksi perubahan bahasa di daerah tidak gampang, karena pihak yang kita lakukan kegiatan belum tentu bisa dengan mudah menerima apa yang kita harapkan, karena persoalan bahasa bukan merupakan hal yang dianggap penting, apalagi pihak swasta yang tidak terlalu peduli dengan apa yang kita suluh. Selain itu, kendala berupa dalam pelaksanaan kegiatan seperti keterlambatan peserta.	Strategi yang dilakukan untuk mencegah hambatan kecil seperti keterlambatan peserta dan sebagainya adalah tetap melakukan koordinasi kepada peserta dan seluruh panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Namun, untuk meningkatkan kepedulian lembaga terhadap pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik yang baik dan benar, kita melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem disiplin Bahasa Indonesia.

Beberapa **langkah antisipasi** yang diambil dalam agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Melakukan pendekatan dengan pihak yang ingin kita kunjungi agar kegiatan bisa dilaksanakan dan bisa diterima dengan baik dan berhasil
- Menentukan metode pelaksanaan kegiatan agar pihak yang kita suluh tidak merasa digurui.
- Pelaksanaan kegiatan diusahakan dilaksanakan dengan target yang ingin kita capai.



Dokumentasi kegiatan:



PENYULUHAN BAHASA INDONESIA BIDANG HUKUM KAB. ACEH BARAT



PENYULUHAN BAHASA INDONESIA
BIDANG HUKUM KAB. BIREUN



PENYULUHAN BAHASA INDONESIA BIDANG HUKUM KAB. BIREUN



PENYULUHAN BAHASA INDONESIA
BIDANG HUKUM KOTA LHOKEUMAWA

Sasaran Kegiatan #3: Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

Sasaran kegiatan ini capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu “Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra”.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 “Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra”.



Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKK 3.1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	500	704	704	1.150	1.200	1.200

Terdapat kenaikan jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra, realisasi target tahun 2021 sebesar 704 Orang dari target indikator kinerja kegiatan sebanyak 704 Orang sehingga persentase pencapaian target yaitu 100 %. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh komponen kegiatan Pembinaan Literasi, Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan di daerah Tk. II, Bengkel Sastra, Sosialisasi Uji Kemahiran



Berbahasa Indonesia (UKBI) dan Peningkatan Kemahiran Berbahasa bagi Pegawai Tata Usaha.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan:

1. Peningkatan literasi generasi muda sebanyak 100 orang
2. Pelaksanaan UKBI sebanyak 100 orang
3. Peningkatan kemahiran berbahasa sebanyak 404 orang
4. Peningkatan apresiasi sastra sebanyak 100 orang

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan.
- b. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan di daerah Tk. II.
- c. Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Tabel 3.6 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 3.1

Kendala/Hambatan	Strategi
Pandemi covid-19 juga menjadi sebab bergesernya jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan berubah lagi sampai dengan belum jelasnya kapan akan melaksanakan kegiatan, karena orang di kabupaten membatasi kunjungan kedaerah mereka. Untuk menuju daerah tujuan perlu persiapan yang dianggap mencukupi terkait perjalanan membutuhkan stamina dan kesehatan yang baik.	Strategi yang dilakukan untuk mencegah hambatan seperti pembatasan aktivitas masyarakat akibat kebijakan PPKM adalah tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk melakukan optimalisasi sisa anggaran sehingga dapat mencapai capaian output menerapkan sistem disiplin Bahasa Indonesia.

Beberapa **langkah antisipasi** yang diambil dalam agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Pemilihan personil panitia yang ditunjuk untuk melakukan tugas
- b. Memantau daerah yang akan dijadikan lokasi kegiatan sehingga status nya aman atau resiko pandemi bisa diantisipasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan diusahakan sesuai perencanaan dan jadwal.
- d. Jadwal yang ditetapkan harus dijalankan sesuai perencanaan.



Dokumentasi kegiatan:



BENGKEL SASTRA DI KAB. PIDIE JAYA 2021



KTI DI KAB. BENER MERIAH



KTI DI KAB. BENER MERIAH



PEMBINAAN LITERASI DI KAB. NAGAN RAYA

Sasaran Kegiatan #4: “Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah”.

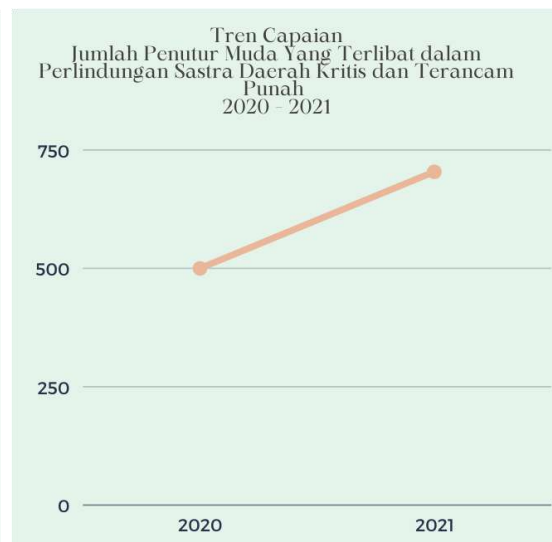
Sasaran kegiatan ini capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu “Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah” dan “Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan”.

Indikator Kinerja Kegiatan 4.2 “Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah ”



Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKK 4.2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah yang Terancam Punah	50	100	100	22	22	22



Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah, realisasi target tahun 2021 sebesar 100 Orang dari target indikator kinerja kegiatan sebanyak 100 Orang sehingga persentase pencapaian target yaitu 100 %. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh komponen kegiatan Revitalisasi Sastra.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan: indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 orang, indikator kinerja kegiatan dengan *output 100 orang* terealisasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Ketercapaian tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh berbagai pihak terutama pihak di kabupaten di daerah tujuan yang sangat mendukung terhadap peningkatan pelestarian sastra daerah mereka ada yang memperhatikan. Kegiatan



revitalisasi sastra dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Meulaboh dan Bireun. Sastra yang dilakukan revitalisasi yaitu (1) Sastra Lisan Popongoten, (2) Sastra Lisan Ure-ure/Kekiteken, (3) Sastra Lisan Mop-Mop, (4) Sastra Lisan Nazam.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh kegiatan sebagai berikut:

a. Revitalisasi Sastra.

Tabel 3.8 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 4.2

Kendala/Hambatan	Strategi
Penentuan narasumber seringkali kurang memenuhi syarat yang kita inginkan karena penghubung dilapangan kurang mendapatkan informasi yang cukup, sastra di daerah sangat kurang mendapat perhatian sehingga menjadikan sastra untuk bisa lebih bisa mendapat perhatian dari masyarakat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dalam proses kegiatan ini, kendala pelaksanaannya adalah karena terjadinya pandemi, PPKM, dan revisi anggaran sehingga kendala tersebut menghancurkan kegiatan untuk diatur jadwal ulang.	Berkoordinasi antara tim dan pimpinan untuk melengkapi berkas serta izin melaksanakan kegiatan. Selain itu, menyesuaikan anggaran dengan hasil revisi.

Beberapa **langkah antisipasi** yang diambil dalam agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Menentukan narasumber dengan lebih spesifik agar tujuan tercapai
- Memantau daerah mana yang menyimpan data yang diinginkan.
- Jadwal yang ditetapkan harus dijalankan sesuai perencanaan, mengingat pandemi covid-19

Dokumentasi kegiatan:



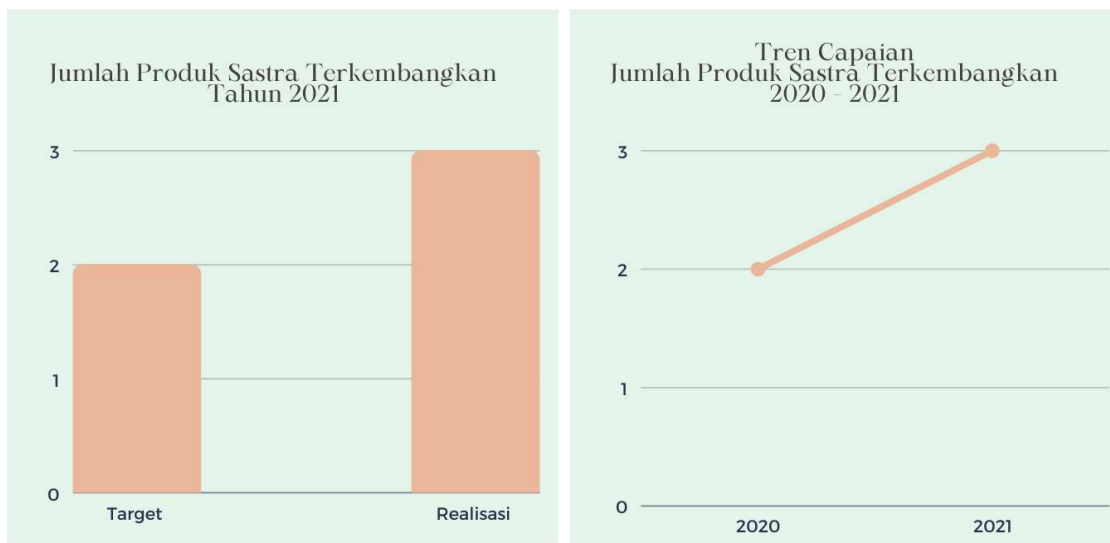


Indikator Kinerja Kegiatan 4.3 “Jumlah Produk Kesastraan Berkembang”.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi IKK 4.3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah Produk Sastra Berkembang	2	2	3	3	3	3

Jumlah produk sastra berkembang dari tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2021 jumlah produk sastra berkembang terealisasi sebesar 3 produk yang berupa produk penerjemahan.



Berdasarkan data kinerja di atas ini dapat jelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Produk Kesastraan Berkembang yang didukung realisasi target tahun 2021 sebesar 3 sastra dari target indikator kinerja kegiatan sebanyak 2 sastra sehingga persentase pencapaian target yaitu 150%. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh komponen kegiatan Penerjemahan naskah bahasa daerah.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan:

indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 2 sastra, indikator kinerja kegiatan dengan *output 3 sastra* terealisasi dengan persentase capaian sebesar 150%. Ketercapaian tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh berbagai pihak terutama pihak di kabupaten di daerah tujuan yang sangat mendukung terhadap kegiatan produk terjemahan.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan produk terjemahan

Tabel 3.10 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 4.3

<i>Kendala/Hambatan</i>	<i>Strategi</i>
Hambatan yang dialami dalam penyusunan produk terjemahan ini adalah keterlambatan dalam proses terjemahan sehingga memakan waktu yang lama untuk proses pencetakan. Proses pencetakan terealisasi di bulan November.	Strategi yang dilakukan adalah pimpinan melakukan koordinasi dengan tim terjemahan sehingga dapat terbentuknya proses <i>follow-up</i> yang sigap untuk menunda keterlambatan proses pencetakan.

Beberapa **langkah antisipasi** yang diambil dalam agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Mencari data tambahan diperpustakaan sangat membantu mendapatkan informasi tambahan.

Dokumentasi kegiatan:





Sasaran Kegiatan #5: “Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”

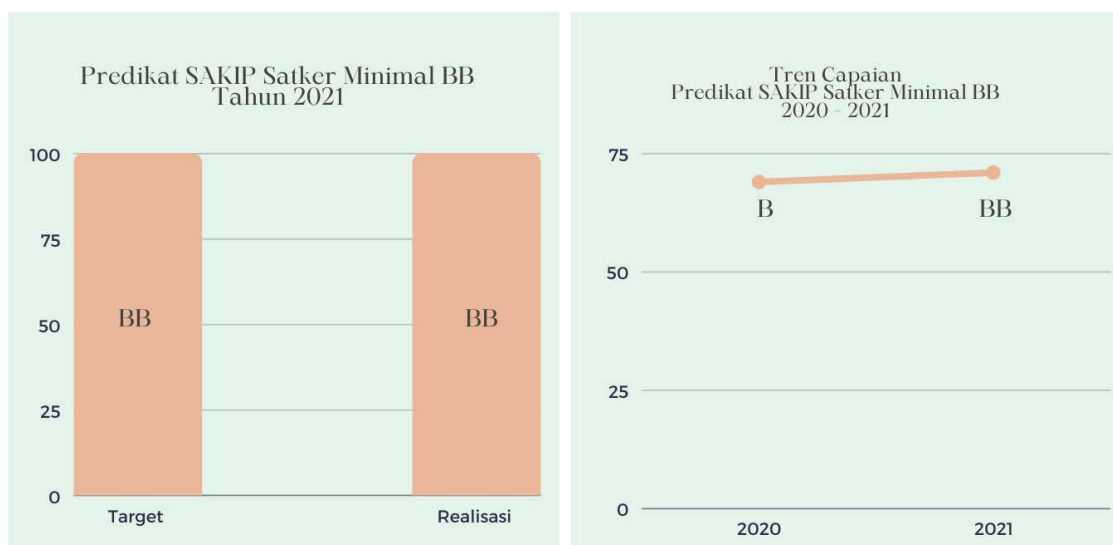
Sasaran Kegiatan ini capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu “Predikat SAKIP Satker Minimal BB”. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91”.

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 “Predikat SAKIP Satker Minimal BB”

Tabel 3.11 Target dan Realisasi IKK 5.1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP satker minimal BB	B	BB	BB	A	A	A

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Balai Bahasa Provinsi Aceh mengalami kenaikan dalam perolehan predikat SAKIP, kenaikan tersebut dari B menjadi BB. Hal ini didukung oleh kelengkapan dokumen dan penyusunan laporan yang semakin meningkat kinerjanya.





Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa sasaran kegiatan Predikat SAKIP Sastker Minimal BB, realisasi target tahun 2021 yaitu Predikat BB dari target Predikat BB sehingga pencapaian target sudah seperti yang diharapkan. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh komponen kegiatan Penyusunan Rencana Program Rencana Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, Pengelolaan kepegawaian, Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan: indikator kinerja kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target Predikat BB sepenuhnya mencapai target Predikat BB, indikator kinerja kegiatan dengan *output Predikat BB*.



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
BALAI BAHASA ACEH
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **BALAI BAHASA ACEH** masuk dalam kategori : **BB** dengan nilai : **71.97** dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23.41%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	21.56%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	8.50%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	5.50%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	13.00%

Tabel 3.12 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 5.1

Kendala/Hambatan	Strategi
Dalam melakukan persiapan penilaian SAKIP, tidak semua pegawai memahami kriteria penilaian SAKIP yang baik, sehingga dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen terdapat beberapa dokumen yang belum lengkap serta penyusunan laporan yang masih harus diperbaiki.	Strategi yang dilakukan adalah berkonsultasi dan koordinasi rutin dengan unit Eselon I serta dengan cermat melakukan pendataan dokumen kebutuhan penilai SAKIP.



PENGHARGAAN PNS TERBAIK
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH 2021



MONITORING DAN EVALUASI
KAB. PIDIE JAYA



UPACARA SETIAP SENIN PAGI



RAPAT KEPECAWAIAN
2021

Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91”

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKK 5.2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020 Realisasi	2021 Target	2021 Realisasi	2022 Target	2023 Target	2024 Target
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	NKA atas pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	93.04	92	88.08	92	92	92

Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa sasaran kegiatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91, realisasi target tahun 2022 yaitu Nilai 88,08 dari target Nilai 92 sehingga pencapaian target tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, didukung oleh

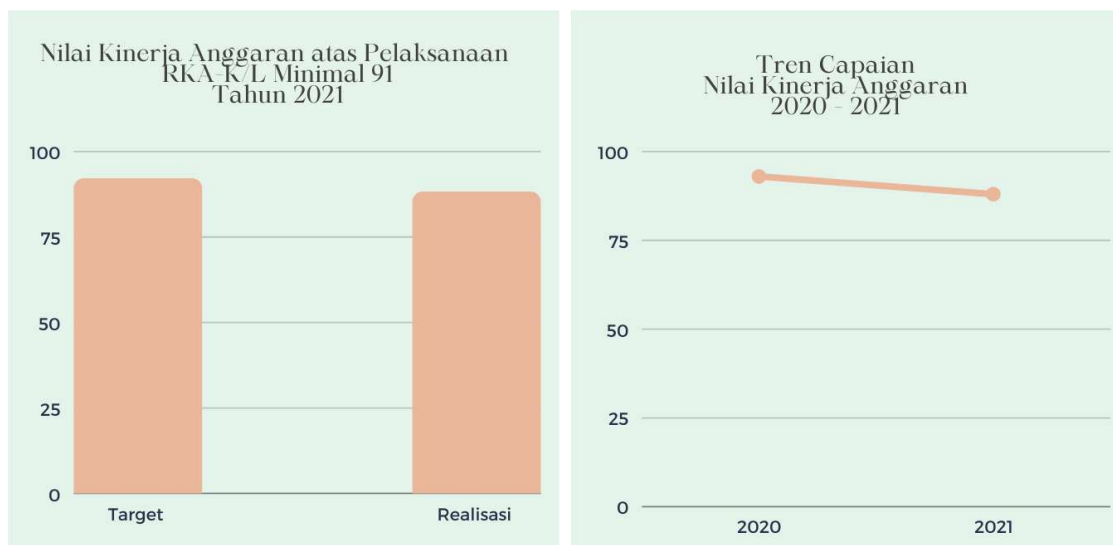


komponen kegiatan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, Pembayaran gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja berdasarkan keluaran kegiatan: indikator kinerja kegiatan ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari target Nilai 92 mencapai target Nilai 88,08, indikator kinerja kegiatan dengan *output minimal* Nilai 91. Ketidak capaian target di atas disebabkan oleh dalam proses konfirmasi capaian output berbeda dengan target output yang ada sehingga nilai yang didapat rendah.

Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor



Tabel 3.14 Kendala/Hambatan dan Strategi IKK 5.2

Kendala/Hambatan	Strategi
Pada aplikasi pengukur nilai IKPA, masih terdapat ketidak sinkronan antara capaian output yang dikonfirmasi dengan data yang diperhitungkan. Selanjutnya, rendahnya nilai EKA yang dikarenakan oleh capaian output yang dikonfirmasi dengan target tidak selaras oleh karena itu dapat menurunkan nilai EKA yang dimana 60% dari nilai EKA masuk dalam perhitungan NKA.	Strategi yang dilakukan adalah memastikan kedua aplikasi yang dilakukan untuk mengkonfirmasi capaian output sudah selaras dan benar. Selain itu, melakukan penyusunan prognosis dengan jelas sehingga mengantisipasi tidakserapan anggaran dan memanfaatkan aplikasi



Akuntabilitas Kinerja

Selain itu, dalam penyerapan anggaran cenderung tidak sesuai dengan RPD sehingga menurunkan nilai IKPA.

SPASIKITA untuk memonitoring capaian output perbulan.

Dokumentasi kegiatan Optimalisasi Kinerja Anggaran:

You are viewing Ajet Sudrajat's screen View Options

menterian Keuangan
rektorat Jenderal Anggaran

Troubleshooting Evaluasi Kinerja Angga

Ketidaklengkapan Informasi Kinerja

- Melengkapi ketersediaan informasi kinerja melalui mekanisme revisi.
- Terhadap perbaikan informasi kinerja level program yang belum *clear* agar dikoordinasikan dengan mitra DJA dan Bappenas untuk penyelesaiannya.

Input Data/Koreksi Data Integrasi

- Input Data/Koreksi Data Integrasi
 - Kolom koreksi di isi apabila diperlukan perbaikan atas Data Integrasi, jika tidak data integ akan digunakan dalam perhitungan NKA satker.
 - RO yang bersifat generik (1 layanan) dapat dilaporkan setiap bulan dalam desimal.
 - RO dengan target 1 (1 dokumen) dilaporkan ketika RO tersebut sudah tercapai 100 persen atau sesuai dengan tahapan pelaksanaannya.
- Input RIKSS dapat di laporkan secara berkala.
- Data capaian yang telah dilaporkan, dapat dilakukan perbaikan sepanjang tahun anggaran.

Konfirmasi Data Capaian

- Data Integrasi Capaian RO akan terkonfirmasi secara otomatis
- Apabila satker melakukan koreksi atas data integrasi dimaksud maka UE I perlu melakukan konfirmasi

NKA Satker ... (2/2)

Kode	Saluran Kerja	Kinerja	Penyerapan	Kemampuan	CRG	Eksternal
440002 KANTOR BAHASA KALAMANTAN UTARA		72,56	85,09	96,04	87,71	3,64
42120 BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN		72,26	88,42	87,59	89,83	-4,13
42430 BALAI BAHASA BALI		71,59	92,89	95,56	87,44	-10,03
42140 BALAI BAHASA SULAWESI UTARA		57,33	77,57	84,65	45,99	0,13
420000 TUGAS PENGEMBANGAN DAN PELUNGGUNGAN		87,75	69,02	76,07	49,5	-12,06

OPTIMALISASI KINERJA ANGGARAN

You are viewing M Nuh's screen View Options

A.A... Ardito Yuliadhi Zhm_Balai Baha...

Abdul... Ardito Yuliadhi Zhm_Balai Bahasa Pro... Irwan

PA

Kelancaran Pelaksanaan Ang
(Realisasi Anggaran, Capaian Ou
Tagihan, SPM yang Akurat, Dispe

Mendukung Manajemen Kas
(Pengelolaan UP/TUP, Revisi
Halaman III DIPA, Retur SP2D

Meningkatkan Kualitas Lapo
(Penyampaian LPJ Bendahara
Minus Belanja)

OPTIMALISASI KINERJA ANGGARAN

OPTIMALISASI KINERJA ANGGARAN

KODE	SATKER	NAMA SATKER	NILAI EKA	NILAI IKPA	TOTAL KINERJA
23	660087	KANTOR BAHASA KALAMANTAN TIMUR	79,31	87,67	86,65

2. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

a. Penyerapan anggaran:
Per 2-5 November 2021

Realisasi Per Jenis Belanja

OPTIMALISASI KINERJA ANGGARAN

Per 7 Desember 2021



B. Akuntabilitas Keuangan

➤ Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebesar **Rp290.050.000** dalam indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar:

- Pemerayaan kosakata Rp207.467.000 dengan serapan dana sebesar Rp204.966.000 dengan persentase serapan sebesar 98,79%
- Pengembangan Kamus Rp82.583.000 dengan serapan dana sebesar Rp80.260.599 dengan persentase serapan sebesar 97,19%

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja (output):

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	290.050.000	285.226.599	98,34
	- Pemerayaan kosakata	207.467.000	204.966.000	98,79
	- Pengembangan kamus	82.583.000	80.260.599	97,19

Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat jelaskan bahwa dari indikator kinerja kegiatan yang hampir mencapai target serapan yaitu Jumlah kosakata bahasa Indonesia hamper mencapai target,

Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi sasaran kegiatan Jumlah kosakata bahasa Indonesia hampir mencapai target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari rata-rata capaian indikator kinerja yang mencapai 98,34%.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya target capaian sasaran kegiatan #1 “**Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia**” adalah:

1. Biaya barang konsumsi yang tidak habis terpakai.



➤ Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebesar Rp308.769.000 dalam indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar:

- Penyuluhan Bahasa Indonesia bidang hukum Rp275.109.000 dengan serapan dana Rp275.105.400 dengan persentase sebesar 99,99%
- Menjalin Indonesia pagu anggaran Rp33.660.000 dengan serapan dana mencapai Rp33.660.000 dengan persentase sebesar 100%.

Dengan demikian serapan anggaran pada sasaran kegiatan ini mempunyai serapan sebesar Rp308.766.400 dengan pagu Rp308.769.000 atau persentase serapan sebesar 100%

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja (*output*):

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1 Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	308.769.000	308.766.400	100
	• Penyuluhan Bahasa Indonesia bidang Hukum	275.109.000	275.106.400	99,99
	• Menjalin Indonesia	33.660.000	33.660.000	100

Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat jelaskan bahwa dari indikator kinerja kegiatan hampir mencapai serapan yang baik, adapun dana yang tersisa pada sasaran strategis ini dikarenakan oleh pemakaian dana selisih pada perjalanan dinas biasa.

➤ Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebesar Rp522.500.000 dalam indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar:

- Peningkatan literasi generasi muda dengan pagu anggaran Rp140.292.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp140.274.400 dengan persentase realisasi sebesar 99,99%



- Sosialisasi Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Tenaga Profesional dan Calon tenaga Profesional dengan pagu anggaran sebesar Rp42.400.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41.985.000 dengan persentase realisasi sebesar 99,8%
- Peningkatan kemahiran berbahasa dengan pagu anggaran sebesar Rp182.208.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp180.808.000 dengan persentase realisasi sebesar 99,9%
- Peningkatan apresiasi sastra dengan pagu anggaran sebesar Rp157.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp157.483.375 dengan persentase realisasi sebesar 99,98%

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja (output):

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	522.500.000	520.550.775	99,63
	• Peningkatan literasi generasi muda	140.292.000	392.033.000	99,99
	• Sosialisasi Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Tenaga Profesional dan Calon tenaga Profesional	42.400.000	41.985.000	99,8
	• Peningkatan kemahiran berbahasa	182.208.000	180.808.000	99,9
	• Peningkatan apresiasi sastra	157.600.000	157.483.375	99,98

Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat jelaskan bahwa dari indikator kinerja kegiatan sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator kinerja kegiatan #1 “**Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra**”, Realisasi anggaran untuk indikator kinerja kegiatan ini hampir tercapai . Dari target sebesar Rp522.500.000 telah terealisasi sebesar Rp520.550.775 dengan persentase capaian sebesar 99,63%. Tidak tercapainya persentase anggaran sebesar tersebut dikarenakan adanya:



- Tidak terserap dana atk bahan kabupaten pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
- Dan juga tidak terserap dari belanja jasa lainnya pada kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa.

➤ Sasaran Kegiatan 4. Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebesar Rp110.297.000 dalam 2 (dua) indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar:

- Revitalisasi Bahasa dengan pagu anggaran Rp110.297.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp110.297.000 dengan persentase realisasi sebesar 100%
- Produk terjemahan dengan pagu

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja (output):

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	1 Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	110.297.000	110.297.000	100
	• Revitalisasi Bahasa	110.297.000	110.297.000	
	2 Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	105.450.000	99.314.000	94,18
	• Penyusunan naskah terjemahan	105.450.000	99.314.000	

Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat jelaskan bahwa dari indikator kinerja kegiatan hampir mencapai target yang telah ditentukan

Indikator kinerja kegiatan #1 “**Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah**”, Realisasi anggaran untuk indikator kinerja kegiatan ini sudah tercapai . Dari target sebesar Rp110.297.000 telah terealisasi sebesar Rp110.297.000 dengan persentase capaian sebesar 100%.



Indikator kinerja kegiatan #1 “**Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan**”, Realisasi anggaran untuk indikator kinerja kegiatan ini hampir tercapai . Dari target sebesar Rp105.450.000 telah terealisasi sebesar Rp99.314.000 dengan persentase capaian sebesar 94,18%. Tidak tercapainya persentase anggaran sebesar tersebut dikarenakan adanya:

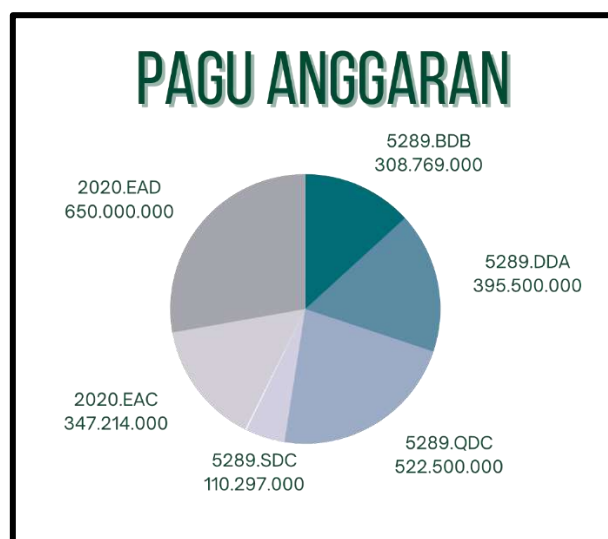
- Tidak terserap dana perjalanan dinas ke kabupaten pada kegiatan tersebut.

1. Alokasi Pagu Anggaran

Total pagu anggaran pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2021 sebesar Rp6.239.206.000 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam ribu Rupiah).

Pagu belanja Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam DIPA dibagi dalam beberapa *Base Line*, sbb.

NO.	KODE	BASE LINE	PAGU ANGGARAN
1.	5289.BDB	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	308.769.000
2.	5289.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	395.500.000
3.	5289.QDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	522.500.000
4.	5289.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	110.297.000
5.	2020.EAA	Layanan Perkantoran	3.904.926.000
6.	2020.EAC	Layanan Umum	347.214.000
7.	2020.EAD	Layanan Sarana Internal	650.000.000
JUMLAH			6.239.206.000





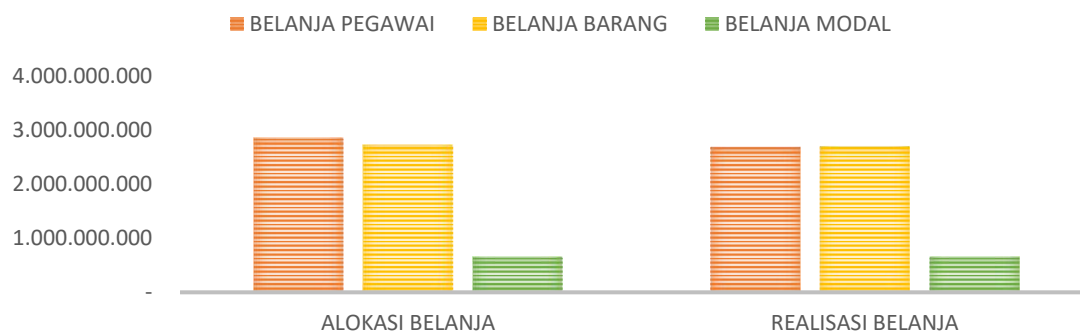
2. Realisasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen penetapan kinerja memerlukan anggaran sebagai dukungannya. Berikut uraian tentang anggaran yang berhasil digunakan dalam upaya pencapaian sasaran tersebut.

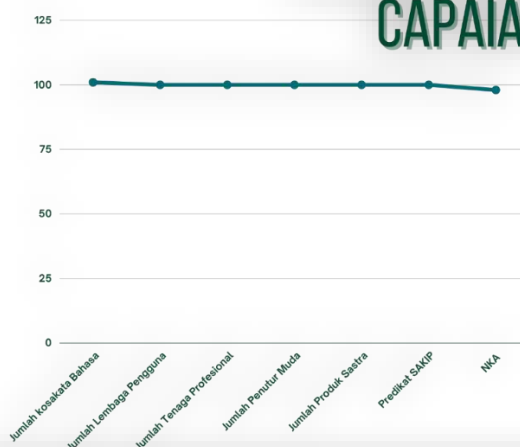
Tabel Belanja berdasarkan serapan pada Belanja Barang dan Belanja Pegawai dan Belanja Modal pada Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2021.

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Barang	2.729.274.000	2.701.668.926	27.605.074	95,81
2	Belanja Pegawai	2.859.932.000	2.690.231.594	169.700.406	94,06
3	Belanja Modal	650.000.000	649.925.015	74.985	100
	Total	6.239.206.000	6.041.825.535	197.380.465	96,84

GRAFIK ALOKASI DAN REALISASI BELANJA



PERSENTASE CAPAIAN





Tabel Belanja per Sasaran Strategis pada Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	1000 kosakata	1 kosakata	100
2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	68 lembaga	109 lembaga	160
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	704 orang	704 orang	100
4	Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	100 Orang	100 Orang	100
		Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	2 produk	2 produk	100
5	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat BB	Predikat BB	100
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91	Nilai 92	Nilai 88,08	95,74

Alokasi anggaran untuk pencapaian **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra** ini adalah sebesar **Rp 6.239.206.000.** yang tersebar di 7 (tujuh) *Base Line*. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar **Rp 6.041.825.535** dengan persentase sebesar **96,84%.** Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan.



Balai Bahasa Provinsi Aceh pada saat pertama menerima DIPA tahun 2021 di akhir tahun 2020 mempunyai pagu DIPA tahun 2021 sebesar **Rp 6.625.156.000** kemudian mengalami revisi dengan mengubah pagu selama 6 kali revisi. Dengan demikian Balai Bahasa Provinsi Aceh mengalami yang keseluruhannya mengalami 6 (enam) kali revisi DIPA pada tahun 2021.

DIPA AWAL	RP 6.625. 156.000 23 NOVEMBER 2020
REVISI 1	RP 6.377.731.000 5 AGUSTUS 2021
REVISI 2	RP 6.377.731.000 18 AGUSTUS 2021
REVISI 3	RP 6.377.731.000 21 SEPTEMBER 2021
REVISI 4	RP 6.377.731.000 15 OKTOBER 2021
REVISI 5	RP 6.239.206.000 4 NOVEMBER 2021
REVISI 6	RP 6.239.206.000 15 NOVEMBER 2021

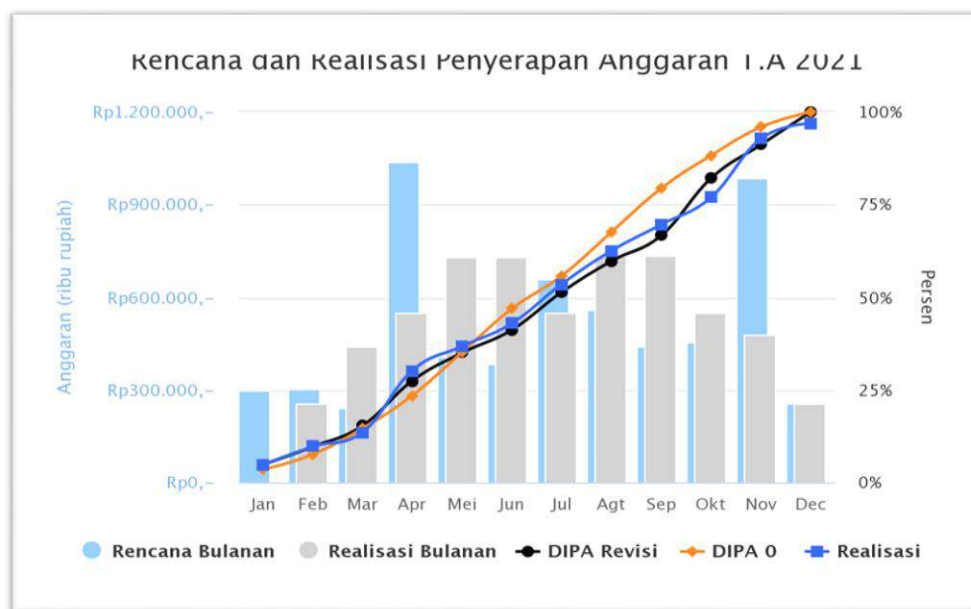
Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 7 (Tujuh) *Base Line* yang ada semua sudah mencapai target.

Berikut rincian realisasi masing-masing *Base Line*:

NO	KODE	BASE LINE	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1.	5289.BDB	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	308.769.000	308.766.400	2.600
2.	5289.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	395.500.000	381.140.599	14.359.401
3.	5289.QDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	522.500.000	520.550.775	1.949.225
4.	5289.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	110.297.000	110.297.000	0
5.	2020.EAA	Layanan Perkantoran	3.904.926.000	3.728.647.221	176.278.779



6.	2020.EAC	Layanan Umum	347.214.000	343.910.084	3.303.916
7.	2020.EAD	Layanan Sarana Internal	650.000.000	649.925.015	74.985
JUMLAH			6.239.206.000	6.041.825.535	



Rp6.239.206.000

----- X 100% = **96,84%**

Rp6.041.825.535

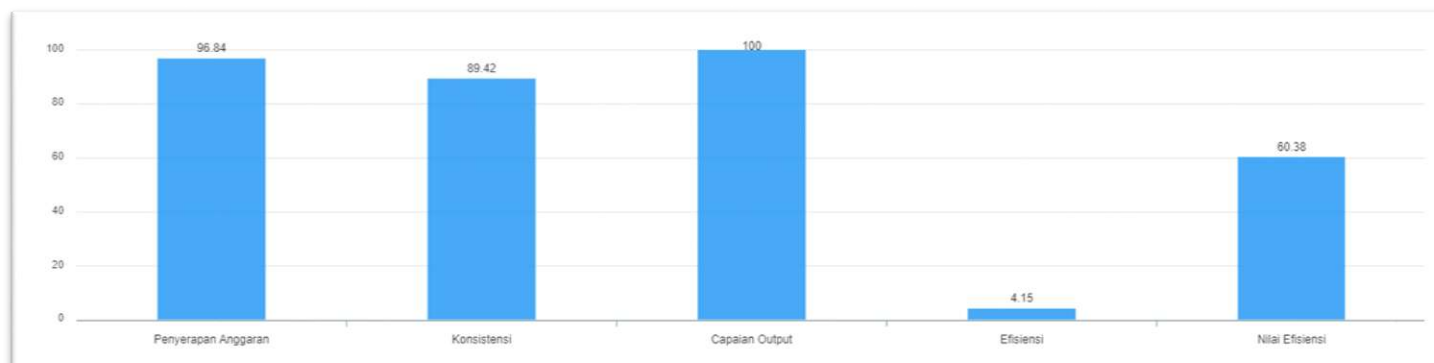
Dengan demikian daya serap secara keseluruhan anggaran tahun 2021 sebesar **Rp6.239.206.000** dari alokasi anggaran sebesar **Rp6.041.825.535** dengan dengan persentase sebesar **96,84%**.



3. Efisiensi Anggaran

Balai Bahasa Provinsi Aceh berhasil melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi target yang telah ditetapkan dan memperoleh efisiensi anggaran sebesar 4,15% dengan nilai efisiensi 60.38 dari perhitungan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan Penyerapan Anggaran 96,84% dan nilai SMART atau nilai EKA 87,23.

Grafik Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran



Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Aceh selama tahun 2021.

No	Jenis Output	Serapan Anggaran (%)	Realisasi	%
1	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	99,88	109 Lembaga	160
2	Penelitian dan Pengembangan Produk	96,37	3 Produk	100
3	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	99,63	704 Orang	100
4	Penelitian dan Pengembangan Modeling	100	1 Model	100
5	Layanan Perkantoran	95,49	1 Layanan	100
6	Layanan Umum	99,05	1 Layanan	100
7	Layanan Sarana Internal	99,99	1 Layanan	100

Penunjang utama efisiensi ada pada jumlah lembaga terfasilitasi layanan bahasa dan hukum yaitu dari target 68 lembaga, Balai Bahasa Provinsi Aceh mampu memperoleh 109 Lembaga sehingga menunjang pencapaian target dengan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP



Selama tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Aceh berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia	1	Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	1000	1000	100
2	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	68	109	160
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	704	704	100
4	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	2	Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	100	100	100
		3	Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	Produk	2	3	150
5	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	BB	BB	100
		2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91	Nilai	92	88,08	95,74

Balai Bahasa Provinsi Aceh akan terus berupaya meningkatkan kinerja. Upaya tersebut tentu saja berjalan seiringan dengan upaya optimalisasi anggaran. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian penggunaan anggaran. Hasil upaya tersebut, pada tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Aceh mampu menyerap anggaran sebesar **96,84%**.



Terkait dengan capaian Sasaran Program, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus melakukan inovasi, tidak hanya inovasi di tengah pandemi, tetapi juga untuk meningkatkan akses, memberikan manfaat, serta dampak yang baik kepada masyarakat.

Pelaksanaan program, anggaran, dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun anggaran 2021 sudah dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat aktivitas pendukung sasaran kegiatan yang capaiannya tidak sesuai target. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada lima tahun pelaksanaan Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh yaitu tahun 2020—2024, merupakan dasar/pedoman bagi Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam menyempurnakan program dan kegiatan di tahun mendatang sehingga target-target yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun berikutnya dapat tercapai dengan baik. **Pada tahun mendatang** Balai Bahasa Provinsi Aceh akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan program dan anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Namun, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan mencapai sasaran pada pelaksanaan program melalui kegiatan-kegiatan selama satu tahun anggaran.

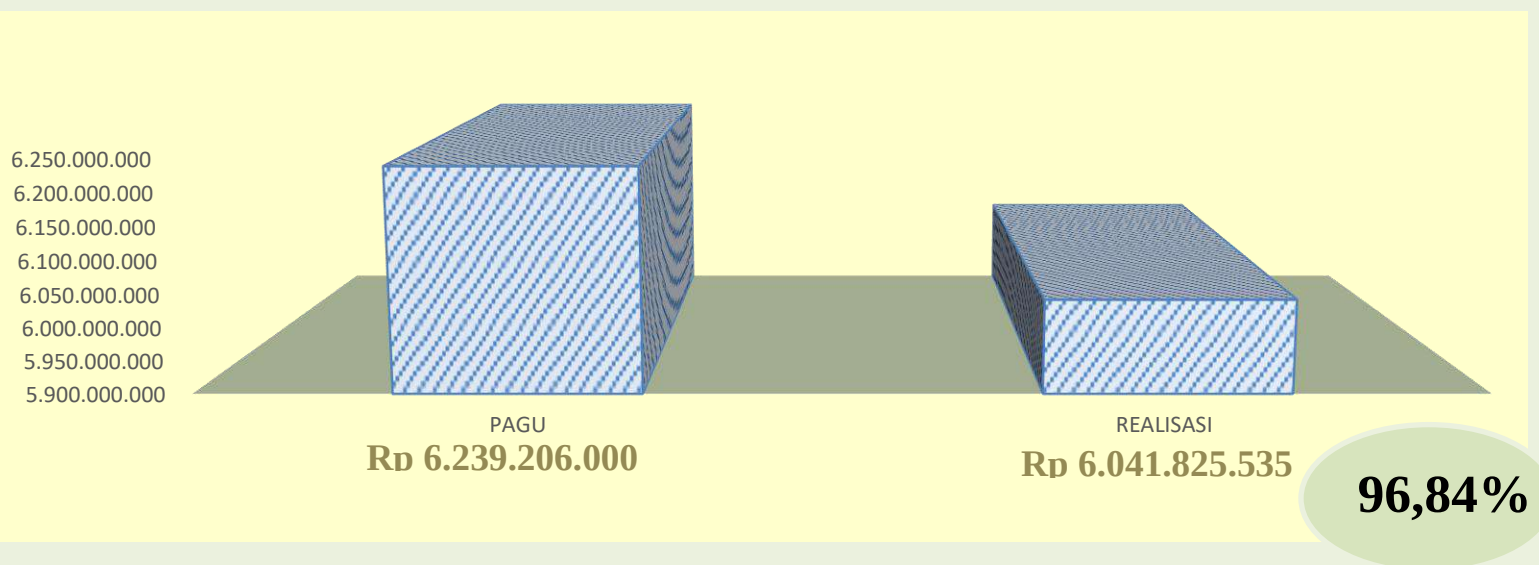
Kendala yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam pencapaian sasaran strategis ini di antaranya: 1. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di awal tahun; 2. Proses penganggaran yang kerap mengalami perubahan sehingga diharuskan untuk merevisi. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyusun dengan matang persiapan pelaksanaan kegiatan di awal tahun, dan 2. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk peningkatan pelayanan prima di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Kondisi ini tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi Balai Bahasa Provinsi Aceh sehingga pada tahun berikutnya perlu melakukan upaya perbaikan terutama dari sisi perencanaan dan meningkatkan upaya pemantauan atas realisasi rencana program dan anggaran yang telah dilaksanakan.



Dari kendala-kendala yang ada, khususnya dalam penyerapan anggaran yang dialokasikan di Balai Bahasa Provinsi Aceh dan untuk lebih meningkatnya pelaksanaan program dan anggaran di tahun yang akan datang, Balai Bahasa Provinsi Aceh merekomendasikan: 1. Meningkatkan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui pelibatan publik dalam usaha memenuhi target capaian kinerja untuk terus melakukan gerakan menasionalkan Bahasa Indonesia di Provinsi Aceh; 2. Sinkronisasi program prioritas di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah, dan Komunitas Literasi agar dilaksanakan mulai awal Tahun 2022; 3. Perlu adanya evaluasi terhadap target-target kinerja yang ada sebagai upaya pemenuhan capaian yang realistis.

KINERJA KEUANGAN TA 2021



Kami berharap Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun anggaran 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh.

LAMPIRAN





**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karyono

Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banda Aceh, 10 Februari 2021

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

E. Aminudin Aziz

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

Karyono

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	[IKK 1.1] Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1000
2	[SK 2] Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	[IKK 2.1] Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	3
3	[SK 3] Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	[IKK 3.1] Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	68
4	[SK 4] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	[IKK 4.1] Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	704
5	[SK 5] Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	[IKK 5.2] Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	100
		[IKK 5.3] Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	2
6	[SK 6] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 6.1] Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 6.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 5.070.557.000
2	5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	Rp. 1.554.599.000
		TOTAL	Rp. 6.625.156.000

Banda Aceh, 10 Februari 2021

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**



E. Aminudin Aziz

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh



Karyono



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karyono

Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banda Aceh, 10 Desember 2021

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

E. Aminudin Aziz

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

Karyono

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	[IKK 1.1] Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1000
2	[SK 2] Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	[IKK 2.1] Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	68
3	[SK 3] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	[IKK 3.1] Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	704
4	[SK 4] Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	[IKK 4.2] Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	100
		[IKK 4.3] Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	2
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	Rp. 1.337.066.000
2	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 4.902.140.000
		TOTAL	Rp. 6.239.206.000

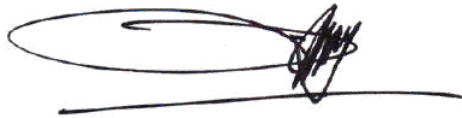
Banda Aceh, 10 Desember 2021

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**



E. Aminudin Aziz

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh



Karyono

RENCANA KERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Mandiri KL : Satker Balai Provinsi Aceh

Tahun : 2021

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Anggaran (4)
1. Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	-	0
2. Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1. Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	68 lembaga	352.988.000
3. Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	604 orang	522.500.000
4. Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	1. Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	1.000 Produk	431.955.000
	2. Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	1 Model	141.666.000
	3. Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan		
5. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1. Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	427.680.000
	2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Minimal 91	Nilai	4.642.877.000

Banda Aceh, Agustus 2020

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

Karyono, S.Pd., M.Hum.

NIP 196606142003121001



**Rencana Aksi
BALAI BAHASA ACEH
Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	[IKK 1.1] Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1000	1000	1000	1000	1000
2	[SK 2.0] Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	[IKK 2.1] Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	3	0	0	0	3
3	[SK 3.0] Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	[IKK 3.1] Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	68	50	50	68	68
4	[SK 4.0] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	[IKK 4.1] Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	704	150	200	300	704
5	[SK 5.0] Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	[IKK 5.1] Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	0	0	0	0	0
		[IKK 5.2] Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	100	0	100	100	100
		[IKK 5.3] Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	2	0	0	0	2
6	[SK 6.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 6.1] Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	-	-	-	BB
		[IKK 6.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	92	-	-	-	92



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 2.859.932.000
2	[001] Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 2.859.932.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 1.091.075.000
4	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 1.091.075.000
5	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 469.550.000
6	[052] Pengelolaan Perpustakaan	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 5.600.000
7	[056] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Balai/Kantor	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 116.564.000
8	[057] Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 111.866.000
9	[058] Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 86.220.000
10	[059] Layanan Barang Milik Negara	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 28.190.000
11	[060] Layanan SDM	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 79.240.000
12	[063] Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12	bulan layanan	3	6	9	12	Rp. 41.870.000
13	Kendaraan Bermotor	1	layanan	0	1	1	1	Rp. 613.340.000
14	[995] Pengadaan Kendaraan	1	layanan	0	1	1	1	Rp. 613.340.000
15	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	2	unit	0	2	2	2	Rp. 36.660.000
16	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2	unit	0	2	2	2	Rp. 36.660.000
17	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	68	Lembaga	20	60	60	68	Rp. 352.988.000
18	[051] Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum	60	Lembaga	20	60	60	60	Rp. 311.460.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

19	[053] Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik	8	Lembaga	0	0	0	8	Rp. 41.528.000
20	Produk Leksikografi Terkembangkan	2	produk	1	1	1	2	Rp. 431.995.000
21	[051] Pemerayaan Kosakata	1	produk	1	1	1	1	Rp. 349.412.000
22	[052] Pengembangan Kamus	1	produk	0	0	0	1	Rp. 82.583.000
23	Produk Penerjemahan	3	produk	2	3	3	3	Rp. 105.450.000
24	[051] Pelaksanaan Penerjemahan	3	produk	2	3	3	3	Rp. 105.450.000
25	Penutur Bahasa Terbina	704	Orang	150	250	400	704	Rp. 522.500.000
26	[052] Peningkatan Literasi Generasi Muda	100	orang	50	100	100	100	Rp. 157.600.000
27	[053] Pelaksanaan UKBI	100	orang	0	0	100	100	Rp. 49.700.000
28	[054] Peningkatan Kemahiran Berbahasa	404	orang	50	100	100	404	Rp. 157.600.000
29	[055] Peningkatan Apresiasi Sastra	100	orang	50	50	100	100	Rp. 157.600.000
30	Model Pelindungan Sastra	1	model	0	0	0	1	Rp. 141.666.000
31	[052] Revitalisasi Sastra	1	model	0	0	0	1	Rp. 141.666.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 6.625.156.000



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Banda Aceh, 25 Maret 2021

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh



Karyono



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI BAHASA ACEH
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	[IKK 1.1] Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	kosakata	1000	TW1 : 1000 TW2 : 1000 TW3 : 1000 TW4 : 1000	TW1 : 1000 TW2 : 1000 TW3 : 1000 TW4 : 1000	TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pencarian pengambilan data kosakata sudah dilakukan pada Maret 2021 Kendala / Permasalahan : Narasumber tidak seperti yang diharapkan, kurang menguasai materi yang ditanyakan tim Strategi / Tindak Lanjut : Identifikasi narasumber yang akan dipakai sebelum kegiatan dilaksanakan TW2 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pencarian data sudah selesai dilakukan dengan tuntas Kendala / Permasalahan : kendala dalam pencarian data dikabupaten narasumber didaerah ada yang harus diganti karena pada saat melakukan wawancara narasumber dianggap kurang menguasai materi yang jadi pertanyaan panitia Strategi / Tindak Lanjut : melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan narasumber yang lebih berkompeten di bidang yang diinginkan TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan kosakata bahasa daerah memiliki tiga tahapan yaitu (1) Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah, (2) Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah dan (3) Sidang Komisi Bahasa Daerah. Kegiatan (1) Pencarian Kosakata telah dilaksanakan di 3 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu, Kab. Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Barat. Setiap kelompok melakukan pengambilan data lapangan di satu wilayah (lokus). Tahap kedua yaitu Lokakarya kamus kemaritiman, tahap kedua ini dilaksanakan pada 23-26 Agustus 2021 di Hotel Permata Hati, Aceh Besar. Tahap terakhir yaitu Sidang Komisi Bahasa Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober. Secara keseluruhan kegiatan penyusunan kamus bahasa daerah bidang kemaritiman ini sudah memenuhi target dengan 1000 kosakata. Kendala / Permasalahan : Kendala yang dialami ketika kegiatan berlangsung yaitu narasumber didaerah yang kurang menguasai materi yang menjadi pertanyaan panitia. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan target Informan berupa nelayan didaerah pesisir yang menguasai Bahasa Aceh di bidang kemaritiman Strategi / Tindak Lanjut : Untuk mendukung keabsahan kosakata yang ditemukan maka pada kegiatan lokakarya dihadirkan narasumber dari berbagai bidang terkait dengan kemaritiman seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh. TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dengan tuntas Kendala / Permasalahan : Pencarian data dilakukan pada awal tahun dan masih dalam situasi pandemi, sehingga proses pencarian data dirasakan masih kurang dalam jumlah kosakata yang ingin ditanyakan kepada narasumber Strategi / Tindak Lanjut : melakukan kegiatan pencarian data langsung kepada pelaku kegiatan/pekerjaan sehari hari sehingga kosakata yang ditanyakan berkembang ke kosakata yang berkaitan dengan hal hal yang diinginkan

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

2	[SK 2.0] Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	[IKK 2.1] Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	3	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 3	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target pada kegiatan ini karena tidak sesuai dengan Renstra Eselon I Kendala / Permasalahan : Tidak bisa melaksanakan kegiatan karena sudah di hapus Strategi / Tindak Lanjut : Karena pembatalan kegiatan dilakukan dan dihapus pada PK tahunan TW2 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target pada kegiatan ini karena tidak sesuai dengan Renstra Eselon I Kendala / Permasalahan : Tidak bisa melaksanakan kegiatan karena sudah di hapus Strategi / Tindak Lanjut : Karena pembatalan kegiatan dilakukan dan dihapus pada PK tahunan TW3 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target pada kegiatan ini karena tidak sesuai dengan Renstra Eselon I Kendala / Permasalahan : Tidak bisa melaksanakan kegiatan karena sudah di hapus Strategi / Tindak Lanjut : Karena pembatalan kegiatan dilakukan dan dihapus pada PK tahunan TW4 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target pada kegiatan ini karena tidak sesuai dengan Renstra Eselon I Kendala / Permasalahan : Tidak bisa melaksanakan kegiatan karena sudah di hapus Strategi / Tindak Lanjut : Karena pembatalan kegiatan dilakukan dan dihapus pada PK tahunan
---	--	---	---------	---	---	---	---

3	[SK 3.0] Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	[IKK 3.1] Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	68	TW1 : 50 TW2 : 50 TW3 : 68 TW4 : 68	TW1 : 26 TW2 : 100 TW3 : 100 TW4 : 109	TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan penyuluhan Bahasa Indonesia Bidang hukum dilaksanakan pada Maret 2021 di kabupaten Aceh Barat Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang memadai Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan sebaiknya dan melakukan konformasi ke Satgas covid-19 di daerah tujuan TW2 : Progress / Kegiatan : Kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia bidang hukum dilakukan di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen Kendala / Permasalahan : tidak kendala pada kegiatan ini Strategi / Tindak Lanjut : berusaha berkoordinasi dengan pihak terkait supaya kegiatan bisa dilaksanakan di kabupaten tujuan TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan Pengutamaan Bahasa dan Hukum sudah dilaksanakan di 3 Kab./Kota yaitu, Kabupaten Aceh Barat, Kota Bireun dan Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini berlangsung lancar dan memiliki antusias dari beberapa lembaga yang mewakili peserta. Kegiatan ini berlangsung pada Maret-April 2021. Pada tahun anggaran 2021, KKLK Bahasa dan Hukum telah menyerap anggaran sebesar 88.22%, tidak terserapnya anggaran sebesar 100 % dikarenakan terjadinya pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 11.78 %. Sehingga 1 kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Pelayanan FGD Bidang Bahasa dan Hukum terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik senilai Rp. 41.526.000. Pada tahun 2021 ini KKLK Bahasa dan Hukum juga telah melakukan pendampingan layanan Saksi ahli bahasa pada lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dengan jumlah lebih dari 50 kali layanan pendampingan yang terhitung pada periode Januari hingga September 2021, yang didampingi oleh 3 orang saksi ahli bahasa Kendala / Permasalahan : Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pengutamaan bahasa dan hukum, tidak terdapat kendala yang signifikan atau menghambat proses terlaksananya kegiatan. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan untuk mencegah hambatan kecil seperti keterlambatan peserta dan sebagainya adalah tetap melakukan koordinasi kepada peserta dan seluruh panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan sudah selesai dilakukan dengan tuntas Kendala / Permasalahan : Adanya pemotongan anggaran sehingga menghapus kegiatan yang mengurangi target capaian Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan optimalisasi kegiatan dari sisa anggaran sehingga memunculkan kegiatan yang bisa menambah capaian yang di targetkan
---	---	--	---------	----	---	--	--

4	[SK 4.0] Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	[IKK 4.1] Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	orang	704	TW1 : 150 TW2 : 200 TW3 : 300 TW4 : 704	TW1 : 150 TW2 : 370 TW3 : 400 TW4 : 704	TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan penyuluhan Literasi bagi generasi muda, pelatihan karya Tulis Ilmiah dan penyuluhan bengkel sastra di Kabupaten/kota Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan harus melakukan koordinasi dengan satgas covid-19 dan mendapatkan ijin pelaksanaan kegiatan dari pihak terkait Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan pihak terkait supaya kegiatan bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang memadai TW2 : Progress / Kegiatan : kegiatan pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah di kabupaten Bener meriah, dan kegiatan Bengkel Sastra di kabupaten Bireun yang semula dijadwalkan pada Juli dimajukan pelaksanaan pada bulan Juni 2021, Penyuluhan Literasi bagi Generasi Muda, dan Sosialisasi UKBI di Universitas Samdera di Aceh Utara dan di Universitas Salikul Saleh Lhokseumawe Kendala / Permasalahan : tidak ada permasalahan pada kegiatan ini Strategi / Tindak Lanjut : melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan satgas covid di daerah tujuan TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang sudah terlaksana: 1) Bimtek Pembelajaran Literasi Berbasis Komunitas 2) Penulisan Karya Tulis Ilmiah 3) Bengkel Sastra. Kegiatan pembinaan literasi bagi guru dan petugas perpustakaan tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Bireun, dan Kabupaten Nagan Raya diselenggarakan di Kabupaten Bireun pada tanggal 16-17 Maret 2021. Balai Bahasa Provinsi Aceh bekerjasama dengan dinas Pendidikan Kabupaten Bireun dalam melaksanakan kegiatan ini. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 50 orang. peserta adalah guru-guru sekolah dasar, petugas perpustakaan, dan anggota komunitas yang ada di Kabupaten Bireun. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan para peserta dalam berliterasi sehingga nantinya diharapkan ilmu yang mereka peroleh dapat di bagikan kepada anak didik dan anggota komunitas lainnya. Indonesia akan melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kemampuan literasi yang baik. Selanjutnya pada kegiatan Bengkel Sastra dan Penulisan KTI, dilaksanakan di Kota Bireun. Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Strategi / Tindak Lanjut : Tetap melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk melakukan optimalisasi sisa anggaran sehingga dapat menambah capaian output. TW4 : Progress / Kegiatan : Melakukan kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi tenaga Tata Usaha dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan di 6 kabupaten/kota Kendala / Permasalahan : sebelumnya tidak ada kegiatan peningkatan mutu tenaga tata usaha dan monitoring dan evaluasi kegiatan, kemudian dilakukan optimalisasi anggaran yang tersisa dari kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan Strategi / Tindak Lanjut : melakukan optimalisasi anggaran sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang bisa menambah capaian target yang diinginkan di awal tahun 2021
---	--	---	-------	-----	--	--	---

5	[SK 5.0] Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	[[IKK 5.1] Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	orang	0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 Kendala / Permasalahan : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 Strategi / Tindak Lanjut : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 TW2 : Progress / Kegiatan : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 Kendala / Permasalahan : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 Strategi / Tindak Lanjut : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 TW3 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target capaian pada indikator ini (indikator ini tidak didukung oleh penganggaran dalam DIPA TA 2021 Kendala / Permasalahan : Tidak ada target capaian pada indikator ini (indikator ini tidak didukung oleh penganggaran dalam DIPA TA 2021 Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada target capaian pada indikator ini (indikator ini tidak didukung oleh penganggaran dalam DIPA TA 2021 TW4 : Progress / Kegiatan : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 Kendala / Permasalahan : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021 Strategi / Tindak Lanjut : kegiatan ini tidak ada target dalam kegiatan ini ditahun 2021
---	--	---	-------	---	--	--	--

6	[SK 5.0] Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	[(IKK 5.2) Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	orang	100	TW1 : 0 TW2 : 100 TW3 : 100 TW4 : 100	TW1 : 0 TW2 : 50 TW3 : 100 TW4 : 100	TW1 : Progress / Kegiatan : Jadwal Pelaksanaan kegiatan revitalisasi sastra lisa Mop-Mop di kabupaten Pidie pelaksanaan kegiatan di bulan April 2021 Kendala / Permasalahan : dana yang tersedia masih dianggap kurang memadai dalam hal pembayaran narasumber karena sastra lisan menampilkan minimal 4 orang tapi dana yang anggarkan cuma 2 orang saja Strategi / Tindak Lanjut : untuk pembayaran narasumber dilakukan untuk 4 orang walaupun dana yang dianggarkan cuma untuk 2 orang saja TW2 : Progress / Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi sastra Lisan Mop-Mop di kabupaten Pidie, dan kegiatan revitalisasi sastra lisa kekiteken di kabupaten bener meriah Kendala / Permasalahan : Adanya pergeseran jadwal kegiatan Revitalisasi sastra lisa pepongoten di kabupaten Aceh Tengah karena adanya kunjungan pendampingan dari pihak Irjen dalam rangka penilaian awal persiapan menuju ZI WBK Strategi / Tindak Lanjut : Kegiatan Revitalisasi sastra lisan Pepongoten akan dilakukan pada awal bulan Juli 2021 TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan revitalisasi sastra dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Meulaboh dan Pidie. Kegiatan sudah terlaksana seluruhnya dengan serapan anggaran sebesar 97,8%. Sastra yang dilakukan revitalisasi yaitu (1) Sastra Lisan Popongoten, (2) Sastra Lisan Ure-ure/Kekiteken, (3) Sastra Lisan Mop-Mop, (4) Sastra Lisan Nazam Kendala / Permasalahan : Dalam proses kegiatan ini, kendala pelaksanaannya adalah karena terjadinya pandemi, PPKM, dan revisi anggaran sehingga kendala tersebut menghancurkan kegiatan untuk diatur jadwal ulang. Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi antara tim dan pimpinan untuk melengkapi berkas serta izin melaksanakan kegiatan. Selain itu, menyesuaikan anggaran dengan hasil revisi. TW4 : Progress / Kegiatan : kegiatan sudah selesai dilaksanakan dengan tuntas Kendala / Permasalahan : pada pelaksanaan kegiatan sempat tertunda dikarenakan adanya kunjungan Irjen dalam rangka ZIWBK Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan kegiatan diawal bulan juli untuk dapat mencapai target yang diinginkan dengan berkoordinasi kembali dengan pihak yang membantu di kabupaten tujuan
---	--	---	-------	-----	--	---	--

7	[SK 5.0] Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	[IKK 5.3] Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	sastra	2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 2	TW1 : 1 TW2 : 2 TW3 : 3 TW4 : 3	TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pengambilan data cerita rakyat Aceh di kabupaten Pidie dan Pidie Jaya Sudah dilaksanakan oleh tim panitia Kendala / Permasalahan : Kendala yang di hadapi masih seputar kondisi pandemi, sehingga masih dalam suasana masyarakat agak segan untuk berkomunikasi dan masih menjaga jarak Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pendekatan secara personal dengan masyarakat supaya informasi yang diinginkan menjadi lebih mudah untuk didapatkan TW2 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pengambilan data cerita rakyat Aceh di kabupaten Bireuen Sudah dilaksanakan oleh tim panitia Kendala / Permasalahan : masih sama dengan kegiatan sebelumnya, masyarakat masih segan untuk berinteraksi karena suasana pandemi yang masih berlangsung di masyarakat Strategi / Tindak Lanjut : terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengumpulan cerita rakyat yang diinginkan TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pengambilan data cerita rakyat Aceh di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Lhoksukon Sudah dilaksanakan oleh tim panitia Kendala / Permasalahan : masih sama dengan kegiatan sebelumnya, masyarakat masih segan untuk berinteraksi karena suasana pandemi yang masih berlangsung di masyarakat, tetapi sudah lebih bisa menerima kehadiran panitia dari Kota bBnda Aceh Strategi / Tindak Lanjut : Tetap berkoordinasi dengan pihak yang terkait di daerah supaya memudahkan tim dalam pencarian data TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dengan tuntas dan menghasilkan cetakan buku terjemahan cerita rakyat aceh dari 3 kabupaten tujuan Kendala / Permasalahan : pengambilan data terjemahan cerita rakyat aceh di kabupaten mengalami kendala dikarenakan narasumber yang diharapkan dapat menuturkan cerita rakyat ternyata belum mampu bercerita dengan baik Strategi / Tindak Lanjut : melakukan penggantian narasumber yang lebih menguasai bahan cerita yang ada di kabupaten tujuan
---	--	--	--------	---	---	---	---

8	[SK 6.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 6.1] Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat BB	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : BB	TW1 : Progress / Kegiatan : kegiatan pendokumentasian semua kegiatan yang berhubungan dengan penilaian SAKIP Kendala / Permasalahan : pendokumentasian semua bahan penilaian SAKIP masih ada yang terlewatkan Strategi / Tindak Lanjut : Berusaha lebih disiplin lagi melakukan dokumentasi bahan yang di anggap perlu untuk penilaian SAKIP TW2 : Progress / Kegiatan : kegiatan yang dilakukan masih menyediakan semua dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian SAKIP Kendala / Permasalahan : masih melakukan pendokumentasian semua hal dalam rangka penilaian SAKIP Strategi / Tindak Lanjut : terus mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik dalam pendokumentasian semua kegiatan TW3 : Progress / Kegiatan : Untuk meningkatkan tata kelola satuan kerja pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan dukungan manajemen Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan layanan umum; Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Layanan SDM, Layanan Humas dan Publikasi, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal. Dalam hal ini, kegiatan operasional berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam RKA/KL. Kendala / Permasalahan : Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa ada kegiatan seperti monev yang harus ditunda karena terbatasnya melakukan perjalanan dinas pada masa PPKM. Strategi / Tindak Lanjut : Menyesuaikan jadwal sehingga anggaran yang tertuang dapat termanfaatkan. TW4 : Progress / Kegiatan : Predikat SAKIP tahun 2021 sudah di umumkan dan sudah mencapai target yang diinginkan yaitu predikat BB Kendala / Permasalahan : Dokumen yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penilaian SAKIP sangat banyak Strategi / Tindak Lanjut : mengusahakan dengan sebaik mungkin memenuhi semua bahan dokumen yang diperlukan untuk mencapai target nilai SAKIP yang diinginkan, mendokumentasikan semua kegiatan yang menunjang kinerja sasker
8	[SK 6.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 6.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai 91	92	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : 92	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 88.08	TW1 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola satker Kendala / Permasalahan : pelaksanaan kegiatan sehari hari perkantoran berjalan seperti perencanaan Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan perkantoran sehari hari dengan memperhatikan semua kebutuhan TW2 : Progress / Kegiatan : melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Kendala / Permasalahan : Pandemi covid 19 masih menjadi penghambat kegiatan Strategi / Tindak Lanjut : terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kinerja satker TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen gaji dan tunjangan dan layanan umum; Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Layanan Barang Milik Negara. Kendala / Permasalahan : Kendala yang terjadi penyerapan anggaran masih berada dibawah target hal ini disebabkan oleh belum terserapnya belanja modal yang diakibatkan proses pelelangan yang ditolak. Strategi / Tindak Lanjut : Untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran dilakukan penunjukan langsung untuk belanja modal. TW4 : Progress / Kegiatan : Sedang menginput capaian kinerja triwulan IV Kendala / Permasalahan : Masih belum mencapai target nilai yang diinginkan Strategi / Tindak Lanjut : melakukan penginputan dengan segera untuk bisa mendapat penilaian yang sesuai target

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	68	Lembaga	26	100	100	109	Rp. 308.769.000
2	[051] Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum	68	Lembaga	26	100	100	109	Rp. 308.769.000
3	Produk Leksikografi Terkembangkan	2	produk	0	0	1.5	2	Rp. 290.050.000
4	[051] Pemerdayaan Kosakata	1	Produk	0	0	1	1	Rp. 207.467.000
5	[052] Pengembangan Kamus	1	Produk	0	0	0.5	1	Rp. 82.583.000
6	Produk Penerjemahan	3	produk	1	2	3	3	Rp. 1.05.450.000
7	[051] Pelaksanaan Penerjemahan	3	Produk	1	2	3	3	Rp. 105.450.000
8	Penutur Bahasa Terbina	704	Orang	150	370	400	704	Rp. 522.500.000
9	[052] Peningkatan Literasi Generasi Muda	100	Orang	50	100	100	100	Rp. 140.292.000
10	[053] Pelaksanaan UKBI	100	Orang	0	70	100	100	Rp. 42.400.000
11	[054] Peningkatan Kenaharian Berbahasa	404	Orang	50	100	100	404	Rp. 182.208.000
12	[055] Peningkatan Apresiasi Sastra	100	Orang	50	100	100	100	Rp. 157.600.000
13	Model Pelindungan Sastra	1	model	0	0	1	1	Rp. 110.297.000
14	[052] Revitalisasi Sastra	1	Model	0	0	1	1	Rp. 110.297.000
15	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0	0	0.7	1	Rp. 2.859.932.000
16	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 2.859.932.000
17	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0	0	0.6	1	Rp. 1.044.994.000
18	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 1.044.994.000
19	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	0	0	0.8	2	Rp. 347.214.000
20	[052] Pengelolaan Perpustakaan	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 5.600.000
21	[056] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Balai/Kantor	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 77.690.000
22	[057] Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 37.156.000
23	[058] Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 49.540.000
24	[059] Layanan Barang Milik Negara	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 19.020.000
25	[060] Layanan SDM	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 62.501.000
26	[063] Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12	Bulan Layanan	3	6	9	12	Rp. 95.707.000
27	Kendaraan Bermotor	1	layanan	0	0	0.5	1	Rp. 514.940.000
28	[995] Pengadaan Kendaraan	1	Layanan	0	0	0.5	1	Rp. 514.940.000
29	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	2	unit	0	0	0.5	8	Rp. 135.060.000
30	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8	Unit	0	0	0.5	8	Rp. 135.060.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 6.239.206.000

Banda Aceh, 19 Januari 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh



Karyono



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125

Telepon (0651) 7551096 dan Faksimile (0651) 7551687

Pos-el (E-mail) : balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id

Laman : www.balaibahasabandaaceh.org

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

NOMOR 28/I4.1/KP/2021

TENTANG PENETAPAN PENYUSUN LAKIN

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan LAKIN perlu ditetapkan Tim Penyusun LAKIN;
- : b. nama-nama yang tercantum dalam bagian lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
- : 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendikbud;
- : 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
- : 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020, tentang APBN T.A 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

KESATU

- : Menunjuk Tim Penyusun LAKIN sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran surat keputusan ini

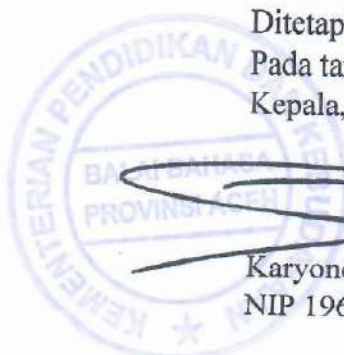
KEDUA

- : Semua biaya yang dibutuhkan akibat dikelurkannya surat keputusan ini d'bebaskan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA 023.13.2.621712/2021, Tanggal 23 November 2020

KETIGA

- : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Januari 2021
Kepala,



Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

NOMOR 28/I4.1/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN PENYUSUN LAKIN

NO	Nama	NIP	Jabatan
1.	Karyono, S.Pd., M.Hum.	196606142003121001	Penanggung Jawab
2.	Agus Priatna, S.E., Ak.	197708082006041002	koordinator
3.	Zulfan, A.Md	197809282005011002	Sekretaris
4.	Rizka Chairunnisa, S.S.	199712052020122006	Operator
5.	Muhammad Ikhsan, S.E., Ak.	197403172005011003	Anggota
6.	Muslim, A.Md.	197208192002121001	Anggota
7.	Cut Nurlaila, S.E.	197606262005012003	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Januari 2021
Kepala,



Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125

Telepon (0651) 7551096 dan Faksimile (0651) 7551687

Pos-el (E-mail) : balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id

Laman : www.balaibahasabandaaceh.org

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

NOMOR 28/14.1/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM SAKIP

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan SAKIP perlu ditetapkan Tim Penyusun SAKIP;
- : b. nama-nama yang tercantum dalam bagian lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendikbud;
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020, tentang APBN T.A 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

KESATU

- : Menunjuk Tim Penyusun SAKIP sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran surat keputusan ini

KEDUA

- : Semua biaya yang dibutuhkan akibat dikelurkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA 023.13.2.621712/2021, Tanggal 23 November 2020

KETIGA

- : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Januari 2021
Kepala,

Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

NOMOR 28/I4.1/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM SAKIP

NO	Nama	NIP	Jabatan
1.	Karyono, S.Pd., M.Hum.	196606142003121001	Penanggung Jawab
2.	Agus Priatna, S.E., Ak.	197708082006041002	koordinator
3.	Zulfan, A.Md	197809282005011002	Sekretaris
4.	Rizka Chairunnisa, S.S.	199712052020122006	Operator
5.	Muhammad Ikhsan, S.E., Ak.	197403172005011003	Anggota
6.	Muslim, A.Md.	197208192002121001	Anggota
7.	Cut Nurlaila, S.E.	197606262005012003	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Januari 2021
Kepala,



Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001

**CASCADING RENCANA STRATEGIS
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
TAHUN 2021**

SS		IKSS		SP		IKP		SK		IKK		KRO		RO		Target	
4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya	4.1	Rata-rata Skor Kemahiran Bahasa Indonesia	6.5	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	6.5.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	5289.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	5289.DDA.001	Produk Leksikografi Terkembangkan	1000	Kosakata
						6.5.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	2	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	2.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	5289.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5289.BDB.001	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	68	Lembaga
						6.5.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	3.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	5289.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5289.QDC.001	Penutur Bahasa Terbina	704	Orang
		4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	6.7	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	6.7.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	4	Terlindungnya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	4.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	5289.SDC	Penelitian dan Pengembangan Modling	5289.SDC.002	Model Pelindungan Sastra	100	Orang
										4.3	Jumlah Produk Sastra Terkembangkan	5289.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	5289.DDA.002	Produk Penerjemahan	2	Produk
5	Meningkatnya Tata Kelola Kemdikbud yang Berkualitas	5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemdikbud	1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemdikbud yang berkualitas	1.1.1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	2020.EAA	Layanan Perkantoran	2020.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
												2020.EAC	Layanan Umum	2020.EAC.001	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan
												2020.EAD	Layanan Sarana Internal	2020.EAD.995	Kendaraan Bermotor	1	Layanan
														2020.EAD.996	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	1	Layanan
										5.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	2020.EAA	Layanan Perkantoran	2020.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan
												2020.EAC	Layanan Umum	2020.EAC.001	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan

Mengetahui,
Kepala

Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125

Telepon (0651) 7551096

Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id

11 Januari 2022

Nomor : 0091/15.1/TU.00.01/2022
Hal : Undangan Rapat Pelaporan dan Reviu Lakin 2021

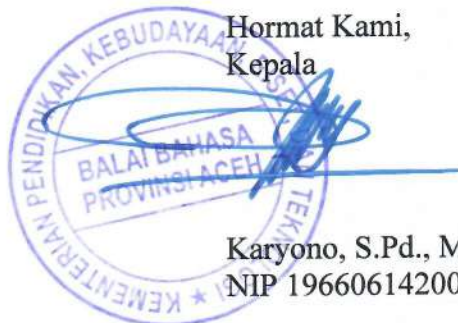
Dengan Hormat,
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh mengundang seluruh Perencanaan dan Pelaporan Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk hadir pada

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Tempat : Ruang Rapat Drs. Syarifuddin Balai Bahasa Provinsi Aceh
Waktu : 09.00 s.d selesai

Untuk mengikuti Rapat Pelaporan dan Reviu Lakin 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Aceh. Kami Mohon kehadiran Saudara dalam rapat tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala



Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001



NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Drs.
Syarifuddin Balai Bahasa Prov. Aceh

Nomor Undangan :
0091/I5.1/TU.00.01/2022
Kegiatan : Diskusi Pelaporan TA
2021 dan Draf Lakin
Pelaksana : KPA, PPK, Perencanaan
dan Pelaporan

Agenda:

1. Pelaporan TA 2021
2. Pembahasan Draf LAKIN 2021

Diskusi:

Pada **Pelaporan TA 2021**, Balai Bahasa Provinsi Aceh telah menyerap anggarannya sebesar 96,84%. Anggaran ini berupa:

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Barang	2.729.274.000	2.701.668.926	27.605.074	95,81
2	Belanja Pegawai	2.859.932.000	2.690.231.594	169.700.406	94,06
3	Belanja Modal	650.000.000	649.925.015	74.985	100
	Total	6.239.206.000	6.041.825.535	197.380.465	96,84

Pada tahun 2021, capaian output yang dikonfirmasi dalam pelaksanaan kegiatan memenuhi target kecuali Nilai Kinerja Anggaran yaitu 88,08 dimana targetnya adalah 92. Ketidakcapaian target ini disebabkan oleh ketidakselarasan konfirmasi capaian output dengan konfirmasi target perbulan sehingga capaian output yang ada tidak sinkron.

LAKIN 2021:

Pada Lakin 2021 memuat tentang penjabaran capaian kinerja organisasi dengan memaparkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.

Efisiensi Balai Bahasa Provinsi Aceh terdapat pada kegiatan pembinaan lembaga terfasilitasi dengan target 68 lembaga dan tercapai 109 lembaga. Efisiensi ini dapat menunjang nilai kinerja anggaran.

Rekomendasi:

- Melakukan revisi pada analisis capaian kinerja setiap sasaran dengan benar
- Memeriksa kembali penggunaan Bahasa dan penulisan pada laporan
- Menyajikan data dengan infografis
- Memperbaiki ikhtisar eksekutif dengan menyampaikan capaian setiap SK dan IKK

Peserta Rapat:

KPA, PPK, Perencanaan dan Pelaporan

Dokumentasi:





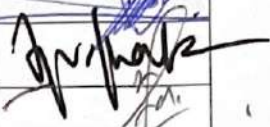
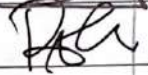
Mengetahui
Kepala,

Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP. 196606142003121001

Notulis,

Rizka Chairunnisa, S.E.
NIP 199712052020121006

DAFTAR HADIR
RAPAT PELAPORAN DAN REVIU LAKIN 2021
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
12 JANUARI 2022

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Karyono, S.Pd., M.Hum.	Kepala Balai	
2	Agus Priatna, S.E., Ak., M.M.	Kasubbag TU	
3	Muhammad Ikhsan, S.E, Ak.	PPAP	
4	Zulfan, S.M.	Bendahara	
5	Rizka Chairunnisa, S.E.	PPAP	

Mengetahui,

Kepala Balai



Karyono, S.Pd., M.Hum.

NIP 196606142003121001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tahun Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, 27 Januari 2022
Ketua SPI Balai Bahasa Provinsi Aceh,



Rahmat, S.Ag., M.Hum.
NIP 197701032002121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

NOMOR : 0153/I4.1/KP.04.00.2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
2020—2024

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Aceh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Bahasa Provinsi Aceh.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh,


Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh
Nomor : 0153/I4.1/KP.04.00.2021
Tanggal : 15 Juni 2021
Nama Unit Organisasi: Balai Bahasa Provinsi Aceh

Tugas

Melaksanakan pengkajian/pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Fungsi

Sebagai pelaksana pengkajian, penelitian, pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Indonesia
2	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian
3	Terwujudnya pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik	Jumlah Lembaga pengguna Bahasa Indonesia terbina
4	Meningkatnya jumlah penutur Bahasa terbina	Jumlah tenaga professional dan calon tenaga professional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra
5	Terlindunginya Bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra di daerah kritis dan terancam punah
		Jumlah produk kesastraan terkembangkan
6	Meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP satker minimal BB
		Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh
Nomor : 0153/14.1/KP.04.00.2021
Tanggal : 15 Juni 2021
Nama Unit Organisasi: Balai Bahasa Provinsi Aceh

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan

SK : Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK : Jumlah kosakata bahasa Indonesia	
Definisi	Metode Penghitungan
Jumlah kosakata bahasa Indonesia adalah jumlah kata yang ada dalam produk leksikografi seperti KBBI, glosarium istilah, kamus bidang ilmu, tesaurus, dan ensiklopedia.	Jumlah kata baru yang masuk dalam 1. KBBI, 2. glosarium istilah, 3. kamus bidang ilmu, 4. tesaurus, dan 5. ensiklopedia.
Cakupan produk kosakata yang dihitung adalah entri Kamus Besar Bahasa Indonesia, entri kamus bidang ilmu, dan hasil pemadanan istilah di Sidang Komisi Istilah.	Satuan: Kosakata Tipe Penghitungan: kumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1. KBBI Daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), 2. Glosarium bidang ilmu (http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/), dan 3. Aplikasi kompilasi kamus (https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus) 4. Tesaurus (http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/) 5. Kamus bidang ilmu 6. Ensiklopedia (ensiklopedia.kemdikbud.go.id)

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia IKK : Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	
Definisi	Metode Penghitungan
Acuan kebahasaan dan kesastraan merupakan produk kebahasaan dan kesastraan, berupa kaidah atau prosedur, yang telah dibakukan dan/atau dikodifikasi untuk dijadikan landasan praktis dalam pengembangan, pembinaan, atau pelindungan bahasa dan sastra.	Jumlah acuan kebahasaan yang disusun Satuan: naskah Tipe Penghitungan: kumulatif
Acuan kebahasaan dipublikasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun digital.	
Tujuan dan manfaat acuan kebahasaan dan kesastraan tersebut adalah sebagai acuan bagi penutur bahasa Indonesia dalam pemakaian bahasa tulis dan komunikasi lisan dengan baik dan benar.	Sumber Data
Bentuk acuan kebahasaan dan kesastraan yang dimaksud, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Praktis, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI).	Laporan Penyusunan Acuan Kebahasaan dan Sastra
	Unit Pelaksana
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SK : Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK : Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	
Definisi Lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina adalah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasa, terutama untuk penggunaan bahasa di ruang publiknya, seperti penggunaan bahasa di papan nama lembaga, nama ruangan, papan petunjuk, rambu, dan sebagainya. Terbina dimaknai dari proses pemantauan, sosialisasi dan audiensi pengutamaan bahasa negara, aksi pengutamaan bahasa negara, pemberian penghargaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis.	Metode Penghitungan Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina meliputi lembaga yang telah mendapatkan intervensi, antara lain, 1. Lembaga yang sudah terpantau; 2. Lembaga yang telah menerima sosialisasi pengutamaan bahasa negara; 3. Lembaga yang telah diaudiensi dan mendapat pendampingan; 4. Lembaga yang telah diberikan aksi; dan 5. Lembaga yang telah penerima penghargaan Satuan : Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif
Unit Pelaksana Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sumber Data Laporan Pengendalian Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

SK : Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina IKK : Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	
Definisi Tenaga profesional dan calon tenaga profesional merupakan tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan pemyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, pembinaan bertujuan meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan sikap apresiatif terhadap sastra. Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga profesional dan calon tenaga profesional karena telah dan akan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal; 2) memiliki keterampilan yang menunjang tugas, 3) melakukan tugas berdasarkan prosedur tertentu (legalitas); 4) memiliki standar pekerjaan; 5) mampu menggunakan fasilitas dan peralatan yang tepat; 6) memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab; 7) mengembangkan ilmu melalui kajian ilmiah/penelitian; 8) menggabungkan diri dalam organisasi profesi; 9) memiliki sumber penghasilan yang jelas; dan 10) memiliki sikap yang profesional.	Metode Penghitungan Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina kemahiran berbahasa Indonesia dan bersastra Indonesia Satuan : Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif
Unit Pelaksana Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sumber Data Laporan penyuluhan bahasa dan apresiasi sastra



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah

Definisi

1. Jumlah penutur muda bahasa, berkewarganegaraan Indonesia (penutur jati/native speaker), yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10—19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah.
2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.
3. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.
4. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (<20) dan yang terancam (<40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41—0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. Berikut tabel kriteria indeks tingkat vitalitas bahasa

No	Tingkat Vitalitas	Angka Indeks*
1	Punah	0,00
2	Kritis	0,01—0,20
3	Terancam	0,21—0,40
4	Mengalami kemunduran	0,41—0,60
5	Rentan	0,61—0,80
6	Aman	0,81—1,00

Metode Penghitungan

Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah peserta revitalisasi dengan jumlah rata-rata keikutsertaan 200 orang. Jika sebuah masyarakat etnik memiliki 1.000 penduduk. Sampel yang dibutuhkan dengan batas toleransi kesalahan 5% adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} = \frac{1000}{(1 + 1000 * 0,05^2)}$$
$$= 285,71 = 286.$$

Satuan: orang
Tipe Penghitungan: Kumulatif

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
IKK : Jumlah produk kesastraan berkembang

Definisi

Produk sastra berkembang adalah hasil upaya peningkatan fungsi dan kedudukan sastra melalui penelitian tematik, penyusunan bahan pengembangan, diseminasi pengembangan, dan pemodernan melalui pemerayaan khasanah, pembakuan sistem, pengembangan laras, peningkatan peran dan fungsi, serta publikasi hasil pengembangan.

Kategori produk sastra berkembang berupa kamus istilah sastra, ensiklopedia sastra Indonesia, penyaduran dan penerjemahan sastra, pengadaptasian sastra kanon ke sastra pendidikan, dan pengalihwahan sastra.

Unit Pelaksana

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. UPT (Balai/Kantor Bahasa)

Metode Penghitungan

Jumlah produk sastra berkembang diperoleh dari rekomendasi penelitian sastra tematik yang dikembangkan sebagai bentuk pemodernan sastra.

Satuan: Sastra
Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan hasil pengembangan sastra di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK : Rata-rata predikat SAKIP minimal BB

Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Unit Pelaksana

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rerata\ SAKIP = \frac{\sum Nilai\ SAKIP_{Satker}}{Jumlah\ Satker}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Unit Pelaksana

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rerata\ NKA = \frac{\sum Nilai\ NKA_{Satker}}{Jumlah\ Satker}$$

Keterangan:
NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



Balaibahasa.aceh



BBhsAceh



Balai Bahasa Provinsi Aceh



balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id

